

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN  
PADA 20 PROVINSI MISKIN DI INDONESIA PADA TAHUN 2015-2024**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Heliyana Fitriani**

**NPM 2211021011**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN  
PADA 20 PROVINSI MISKIN DI INDONESIA PADA TAHUN 2015-2024**

Oleh  
**Heliyana Fitriani**

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA EKONOMI**

Pada

**Jurusan Ekonomi Pembangunan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## ABSTRAK

### ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN PADA 20 PROVINSI MISKIN DI INDONESIA PADA TAHUN 2015-2024

OLEH

HELIYANA FITRIANI

Kemiskinan masih menjadi permasalahan struktural di Indonesia, khususnya di wilayah dengan tingkat ketergantungan tinggi terhadap sektor pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Nilai Tukar Petani (NTP), Tenaga Kerja Pertanian (TKP), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap tingkat kemiskinan pada dua puluh provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia periode 2015–2024. Penelitian ini menggunakan data panel sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan metode regresi data panel melalui pendekatan Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. NTP dan HLS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan TKP dan TPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Temuan ini menunjukkan bahwa dinamika kemiskinan dipengaruhi oleh faktor struktural seperti produktivitas sektor pertanian, kualitas pendidikan, dan kondisi pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas pertanian, kualitas sumber daya manusia, serta penciptaan lapangan kerja produktif.

**Kata kunci: Kemiskinan, PDRB, Nilai Tukar Petani, Pendidikan, Data Panel, Fixed Effect Model.**

## **ABSTRACT**

### ***ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING POVERTY IN 20 POOR PROVINCES IN INDONESIA FROM 2015-2024***

**BY**

**HELIYANA FITRIANI**

*Poverty remains a structural problem in Indonesia, especially in regions with a high level of dependence on the agricultural sector. This study aims to analyze the effect of Gross Regional Domestic Product (GRDP), Farmer Exchange Rate (NTP), Agricultural Labor Force (TKP), Expected Years of Schooling (EYS), and Open Unemployment Rate (OUR) on poverty levels in the twenty provinces with the highest poverty rates in Indonesia for the period 2015–2024. This study uses secondary panel data sourced from the Central Statistics Agency (BPS) with a panel data regression method using the Fixed Effect Model (FEM) approach. The results show that GRDP has no significant effect on poverty. NTP and ESL have a negative and significant effect on poverty, while ALW and OUR have a positive and significant effect on poverty. These findings indicate that poverty dynamics are influenced by structural factors such as agricultural sector productivity, education quality, and labor market conditions. Therefore, poverty alleviation policies need to be directed at increasing agricultural productivity, improving human resource quality, and creating productive jobs.*

***Keywords: Poverty, GRDP, Farmer Exchange Rate, Education, Panel Data, Fixed Effect Model.***

Judul Skripsi

**: ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI KEMISKINAN PADA 20  
PROVINSI MISKIN DI INDONESIA PADA  
TAHUN 2015-2024**

Nama Mahasiswa  
Nomor Pokok Mahasiswa  
Program Studi  
Fakultas

**: Heliyana Fitriani**  
: 2211021011  
: Ekonomi Pembangunan  
: Ekonomi dan Bisnis



**Dr. Asih Murwati. S.E.,M.E.**  
NIP 197404102008122001

**MENGETAHUI**

**2. Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan**

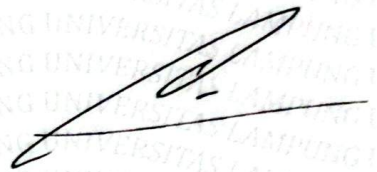
A handwritten signature in black ink, appearing to be "Arivina", is written over the text of the second approver.

**Dr. Arivina Ratih Y.T. S.E.,M.M.**  
NIP 19800705200604200

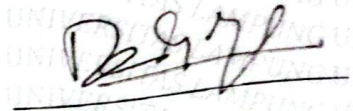
**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Asih Murwiati, S.E., M.E.**



Penguji I : **Dr. Dedy Yulianan, S.E., M.Si.**



Penguji II : **Dr. Arivina Ratih Y.T. S.E., M.M.**



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



**Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si**  
NIP.196606211990031003

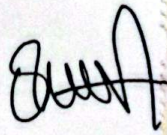
**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 12 Februari 2026**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli yang saya susun dengan penuh tanggung jawab dan bukan merupakan plagiasi dari karya orang lain. Jika di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 12 Februari 2026

Penulis



Heliyana Fitriani

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Heliyana Fitriani, lahir di Bukit Kemuning, Lampung Utara pada tanggal 18 Oktober 2004. Penulis merupakan anak perempuan keempat dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Marsani dan Ibu Tati. Penulis memiliki dua kakak laki-laki, satu Perempuan dan memiliki adik laki-laki, penulis memulai pendidikannya di TK Muslimin di Bukit Kemuning, Lampung Utara pada tahun 2009 dan 2010, melanjutkan pendidikan di SD 5 Bukit Kemuning, Lampung Utara pada tahun 2010-2016, penulis melanjutkan pendidikan di SMP 1 Bukit Kemuning Lampung Utara pada tahun 2016-2019 kemudian penulis melanjutkan Pendidikan SMA 1 Bukit Kemuning, Lampung Utara pada tahun 2019-2022.

Pada tahun 2022, penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Selama menjalani perkuliahan, penulis aktif dalam kegiatan organisasi mahasiswa, sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HIMEPA). Pada tahun 2025, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I Universitas Lampung sebagai Sekretaris di Desa Mataram Ilir, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah selama 40 hari, dan penulis mengikuti magang mandiri di Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung selama dua bulan.

## **MOTTO**

**“La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadzolimin”  
(Bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya  
aku adalah termasuk orang – orang zalim)**

**“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan  
kesanggupannya”  
(QS. Al-Baqarah: 286)**

**“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya  
bersama kesulitan ada kemudahan”  
(QS. Al-Insyirah: 5-6)**

**“Akan ada hasil yang membahagiakan menanti kita jika kita bersungguh  
sungguh berusaha dan berdoa”  
(Heliyana Fitriani)**

**“Ambisiku bergejolak, antusias tak karuan banyak mimpi mimpi yang kan  
ku kejar”  
(Idgitaf – Takut)**

## PERSEMBAHAN

Dengan Segala puji dan Syukur bagi Allah SWT atas limpahkan rahmat serta nikmat dan pertolongan yang Allah berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ini. Shalawat serta salam ke hadirat baginda nabi agung Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Penulis persembahkan karya tulis terbaik ini kepada:

*Kedua orang tua tersayang, tercinta, terhormat Bapak Marsani dan Ibu Tati terimakasih selalu menjadi alasan penulis untuk selalu kuat menjalani kehidupan yang rumit ini, terimakasih telah selalu menjadi tempat bersadar, telah menjadi tempat pulang dikala berantakan, terimakasih setiap waktu siang dan malam selalu mendoakan penulis tanpa kenal lelah, terimakasih masih menjadi kesempatan untuk bisa menempuh pendidikan meskipun keterbatasan yang kita punya, terimakasih atas segala usaha dan arahan yang telah membuka pandangan mata yang menjadi lebih luas. Semoga tidak ada usaha yang menjadi sia sia untuk setiap usaha yang telah diberikan.*

Untuk keluarga besarku, aa dan teteh, teteh ipar serta ponakan tersayang, yang selalu memberikan dukungan dan bantuan setiap usaha yang penulis lakukan, setiap keluh kesah yang selalu penulis bicarakan.

Untuk dosen pembimbing, dosen penguji serta dosen dosen fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan arahan, pelajaran, motivasi dan nasihat yang sangat membantu dan membangun.

## SANWANCANA

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya yang senantiasa tercurah tanpa henti, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Pada 20 Provinsi Miskin Di Indonesia Pada Tahun 2015-2024” dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan, hambatan, dan tantangan, baik dari segi akademik maupun nonakademik. Oleh karena itu, keberhasilan penyelesaian skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan, motivasi, serta dukungan moril maupun materil dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran. Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Arivina Ratih Yulihar Taher, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, sekaligus Dosen Penguji, yang telah menyediakan waktu untuk memberikan masukan, saran, nasihat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Zulfa Emalia, S.E., M.Sc., selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Asih Murwiati, S.E., M.E., selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan, ilmu yang sangat bermanfaat, serta semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Dedy Yuliawan, S.E., M.Si., selaku Dosen Penguji yang telah menyediakan waktu untuk memberikan masukan, saran, nasihat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. Ambya, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing akademik yang telah menyediakan waktu untuk memberikan arahan, nasihat dan menyemangati pada masa perkuliahan
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Lampung, Serta seluruh staf dan pegawai Fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi ini.
8. Kepada kedua orang tua tercinta dan tersayang, Bapak Marsani dan Ibu Tati, terima kasih papa dan mama yang selalu mendoakan setiap waktu siang dan malam tanpa pernah lelah, tidak pernah lelah memberikan kasih sayang yang sangat besar, kesabaran yang sangat luas, dukungan setiap langkah, terima kasih selalu mengingatkan hal hal kebaikan maupun keburukan. Motivasi terbesar adek dalam menyelesaikan studi ini, terima kasih sebesar besarnya. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala yang sangat berlimpah, kebahagiaan dan kesembuhan papa dan mama.
9. Kepada aa tersayang, adek tersayang, teteh ipar serta ponakan, a imam, a ari, teteh indah, adek iki, teteh novi, dan bunda terima kasih telah menyayangi, mendoakan, serta mendukung dan membantu setiap kesulitan, keponakan keponakanku tersayang yang telah menjadi semangat dan obat lelah
10. Kepada sahabat penulis sedari smp, jea, ica, kiting, uti, jara dan oca, terima kasih selalu menjadi tempat pendengar, terima kasih atas dukungan dukungan yang telah diberikan, terima kasih telah menjadi salah satu tempat pulang dalam berteman, terima kasih selalu mengingatkan satu sama lain.
11. Kepada sahabat sedari perkuliahan, windrie, intan, rahma, mely, gita, dan nandya, menjadi keluarga baru dalam perkuliahan, selalu menyemangati satu sama lain, terima kasih masih selalu bersama sedari maba, terima kasih selalu memberikan solusi solusi dalam keadaan sulit, selalu jadi tempat *healing* saat sulit sulit menempuh studi dan penulisan skripsi ini.

12. Kepada teman-teman Jurusan Ekonomi Pembangunan Angkatan 22 yang tidak dapat di sebutkan satu persatu, terima kasih selalu bersama dan dukungan-dukungan nya satu sama lain selama perkuliahan hingga selesai
13. Kepada seseorang yaitu raden alfathan nadianto, terima kasih masih selalu bersama dengan manusia sulit ini, sedari sekolah menengah atas, terima kasih selalu menyemangati setiap saat tanpa kenal lelah, mendukung apa pun yang akan aku lakukan, terima kasih selalu jadi motivasi sampai saat ini, selalu ada saat masa masa sulit, selalu jadi pendengar, selalu memberikan solusi solusi, selalu jadi tempat pulang ternyaman dan tempat bersandar yang tidak akan menghakimi aku, terima kasih sudah menemani sampai sekarang yaitu 6 tahun lamanya.
14. Dan yang terakhir kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan serta waktu, sebagai bentuk dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT dengan segala ridho dan kasih sayang-Nya senantiasa memberikan balasan yang berlipat ganda atas segala kebaikan, bantuan, dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis, serta membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi penyusunanS maupun isi pembahasan. Namun demikian, penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi bahan referensi yang berguna bagi penulis sendiri khususnya, serta bagi para pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan pada umumnya. Aamiin ya Rabbal ‘alamin.

Bandar lampung, 12 Februari 2026

Heliyana Fitriani

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR .....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xix
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	12
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Manfaat Penelitian .....	13
II. KAJIAN PUSTAKA .....	15
2.1. Kajian Teori.....	15
2.1.1. Kemiskinan .....	15
2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto .....	22
2.1.3. Nilai Tukar Petani .....	25
2.1.4. Tenaga Kerja Petani .....	27
2.1.5. Harapan Lama Sekolah .....	30
2.1.6. Tingkat Pengangguran Terbuka.....	33
2.2. Kajian Empiris .....	37
2.3. Kerangka Pemikiran.....	42
2.4. Rumusan Hipotesis .....	44
III. METODOLOGI PENELITIAN.....	45

3.1.	Jenis dan Sumber Data .....	45
3.2.	Definisi Operasional Variabel .....	47
3.2.1	Kemiskinan (P) .....	47
3.2.2	Produk Domestik Bruto Sektor Pertanian (PDRB).....	48
3.2.3	Nilai Tukar Petani (NTP) .....	48
3.2.4	Tenaga Kerja Petani (TKP) .....	49
3.2.5	Harapan Lama Sekolah (HLS).....	49
3.2.6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	50
3.3.	Metode Analisis.....	50
3.3.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	56
3.3.2	Estimasi Model .....	56
3.3.3	Pemilihan Model .....	58
3.3.4	Uji Asumsi Klasik .....	58
3.3.5	Uji Hipotesis .....	60
1.	Uji t .....	60
2.	Uji F .....	61
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN .....	62
4.1.	Analisis Statistik Deskriptif .....	62
4.2.	Estimasi Model Panel.....	64
4.2.1.	Uji Common Effect Model.....	64
4.2.2.	Uji Fixed Effect Model .....	66
4.2.3.	Uji Random Effect Model.....	68
4.3.	Pemilihan Model.....	69
4.4.	Uji Asumsi Klasik .....	71
4.4.1	Uji Multikolinieritas.....	72
4.4.2	Uji Heterokedastisitas .....	72
4.4.3	Uji Autokorelasi .....	73

4.4.4 Uji Normalitas .....	74
4.5. Pengujian Hipotesis.....	74
4.5.1 Uji t-Statistik .....	74
4.5.2. Uji F-Statistik.....	76
4.5.3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	77
4.6. Interpretasi Hasil Regresi Fixed Effect Model.....	77
4.11 Pembahasan Hasil Penelitian .....	80
4.12 Implikasi Hasil Penelitian .....	87
4.12.1 Kebijakan Pada Jangka Pendek.....	87
4.12.2 Kebijakan Pada Jangka Panjang .....	88
V. KESIMPULAN DAN SARAN .....	90
5.1. Kesimpulan .....	90
5.2 Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA .....	95
LAMPIRAN.....	102

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1. Penelitian – Penelitian Empiris yang Relevan .....	37
3.1. Variabel, Simbol, Satuan dan Sumber Data .....	47
4.1. Hasil Statistik Deskriptif.....	62
4.2. Hasil Uji Common Effect Model .....	65
4.3. Hasil Fixed Effect Model .....	66
4.4. Hasil Random Effect Model.....	68
4.5. Hasil Uji Chow.....	70
4.6. Hasil Uji Lagrangian Multiplier.....	70
4.7. Hasil Uji Hausman .....	71
4.8. Hasil Uji Multikolinieritas .....	72
4.9. Hasil Uji Heterokedastisitas .....	73
4.10. Hasil Uji Autokorelasi.....	73
4.11. Hasil Uji Normalitas.....	74

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1. Tingkat Kemiskinan di Indonesia Berdasarkan Garis Kemiskinan Internasional yang Baru .....	1
1.2. Kemiskinan vs Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Nilai Tukar Petani (NTP) .....	5
1.3. Persentase Kemiskinan pada 20 Provinsi di Indonesia 2024 (%) .....	8
1.4. Kemiskinan vs Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) .....	10
2. 1. Perhitungan Harapan Lama Sekolah .....	31
2. 2. Perhitungan Tingkat Pengangguran Terbuka .....	36
2. 3. Kerangka Pemikiran .....	43
3.1. Kerangka Metodologi .....	53
4.1. Grafik Trend Rata-Rata Kemiskinan .....	80
4.2. Hubungan Kemiskinan dan PDRB .....	82
4.3. Hubungan Kemiskinan dan Nilai Tukar Petani .....	84

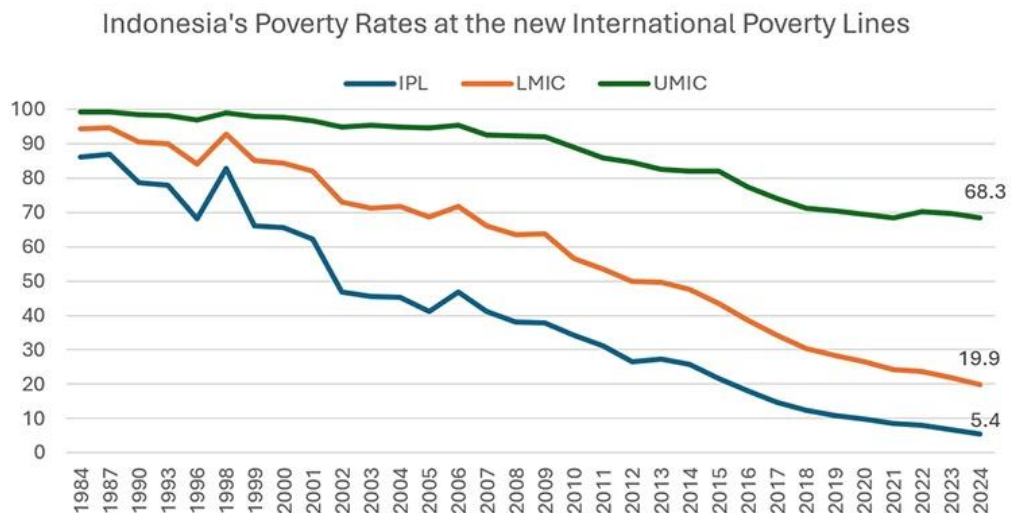
## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Data Variabel-variabel Penelitian 2015-2024 .....	103
2. Regresi Linier Berganda ( <i>Pooled OLS / Common Effect</i> ) .....	109
3. Uji Fixed Effect (FE) – <i>Fixed Effects (Within) Regression</i> .....	109
4. Uji Random Effect (RE) – <i>Random Effects GLS Regression</i> .....	110
5. Uji Chow .....	110
6. Uji Hausman .....	110
7. Uji Lagrange Multiplier (LM) <i>Breusch–Pagan</i> .....	111
8. Uji Heterokedastisitas .....	111
9. Uji Autokorelasi Wooldridge .....	111
10. Uji Multikolinearitas (VIF – <i>Variance Inflation Factor</i> ) .....	112
11. Uji Normalitas .....	112

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kemiskinan hingga saat ini masih merupakan menjadi tantangan utama dalam pembangunan ekonomi global, termasuk di Indonesia yang secara struktural memiliki basis ekonomi agraris. Laporan Bank Dunia (2023) mencatat bahwa lebih dari 700 juta penduduk dunia masih berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem, dengan mayoritas di antaranya bermukim di wilayah perdesaan dan menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pembangunan pada sektor ini memiliki posisi strategis dalam mendukung pengurangan kemiskinan, baik secara global maupun di Indonesia.



(Sumber: World Bank, 2025)

**Gambar 1.1. Tingkat Kemiskinan di Indonesia Berdasarkan Garis Kemiskinan Internasional yang Baru**

Perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia dapat dilihat berdasarkan garis kemiskinan internasional yang ditetapkan oleh Bank Dunia, yang mencakup International Poverty Line (IPL) sebesar US\$2,15 PPP per hari, Lower Middle-Income Class Poverty Line (LMIC) sebesar US\$3,65 PPP per hari, serta Upper Middle-Income Class Poverty Line (UMIC) sebesar US\$6,85 PPP per hari. Secara umum, data menunjukkan adanya penurunan tingkat kemiskinan yang cukup signifikan selama empat dekade terakhir. Pada tahun 1990, sekitar 85 persen penduduk Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan UMIC, sementara pada tahun 2024 proporsi tersebut menurun menjadi 68,3 persen. Berdasarkan standar LMIC, persentase penduduk miskin juga mengalami penurunan dari sekitar 80 persen pada awal 1990-an menjadi 19,9 persen pada tahun 2024. Adapun jika diukur menggunakan garis kemiskinan internasional yang paling ekstrem, yaitu IPL, tingkat kemiskinan nasional berhasil ditekan hingga mencapai 5,4 persen pada tahun 2024 (World Bank, 2025b)

Namun demikian, walaupun angka kemiskinan nasional menurun dan menunjukkan hasil yang baik secara umum, masalah kemiskinan di Indonesia masih bersifat mendasar dan berbeda-beda tingkatnya di setiap daerah serta sektor ekonomi. Penurunan agregat kemiskinan belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kesejahteraan yang merata, terutama pada kelompok masyarakat yang menggantungkan sumber penghidupannya pada sektor-sektor dengan produktivitas relatif rendah. Kegiatan ekonomi di tingkat regional berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, baik melalui penyediaan kesempatan kerja maupun sumbangannya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di berbagai provinsi. Namun, peningkatan kontribusi ekonomi daerah tersebut belum sepenuhnya diiringi oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merata. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa meskipun PDRB regional terus mengalami peningkatan, sebagian kelompok pekerja masih menghadapi tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dibandingkan dengan kelompok pekerja di sektor lain. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketimpangan dalam distribusi hasil pembangunan, di mana pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mampu

meningkatkan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat secara proporsional.(BPS, 2025b)

Pada Maret 2023, tingkat kemiskinan di Indonesia tercatat mencapai 9,36 persen atau sekitar 25,90 juta penduduk, yang menandakan bahwa kemiskinan masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan ekonomi nasional (BPS, 2023e). Kondisi tersebut mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara pertumbuhan ekonomi sektoral dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya pada wilayah dan kelompok penduduk yang bergantung pada sektor primer. Fenomena tersebut mencerminkan adanya ketidakseimbangan struktural dalam proses pembangunan, di mana peningkatan output ekonomi belum sepenuhnya mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara proporsional. Sejalan dengan temuan (Amalia et al., 2022) serta, (Udi et al., 2023) rendahnya produktivitas sektor pertanian, keterbatasan kualitas sumber daya manusia, serta lemahnya daya beli yang tercermin melalui Nilai Tukar Petani menjadi faktor penting yang membatasi peran sektor pertanian dalam menurunkan kemiskinan.

Selain itu, faktor sosial-ekonomi seperti Harapan Lama Sekolah dan Tingkat Pengangguran Terbuka turut memengaruhi kemampuan rumah tangga dalam keluar dari kemiskinan. Dengan demikian, kajian mengenai kemiskinan perlu dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan hubungan antara pertumbuhan ekonomi, Kualitas sumber daya manusia serta dinamika pasar tenaga kerja menjadi faktor penting dalam menjelaskan variasi tingkat kemiskinan antarprovinsi di Indonesia. Dengan demikian, kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomi semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh capaian pembangunan manusia dan kondisi ketenagakerjaan. (Umara et al., 2024) Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan PDRB per kapita berperan penting serta memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

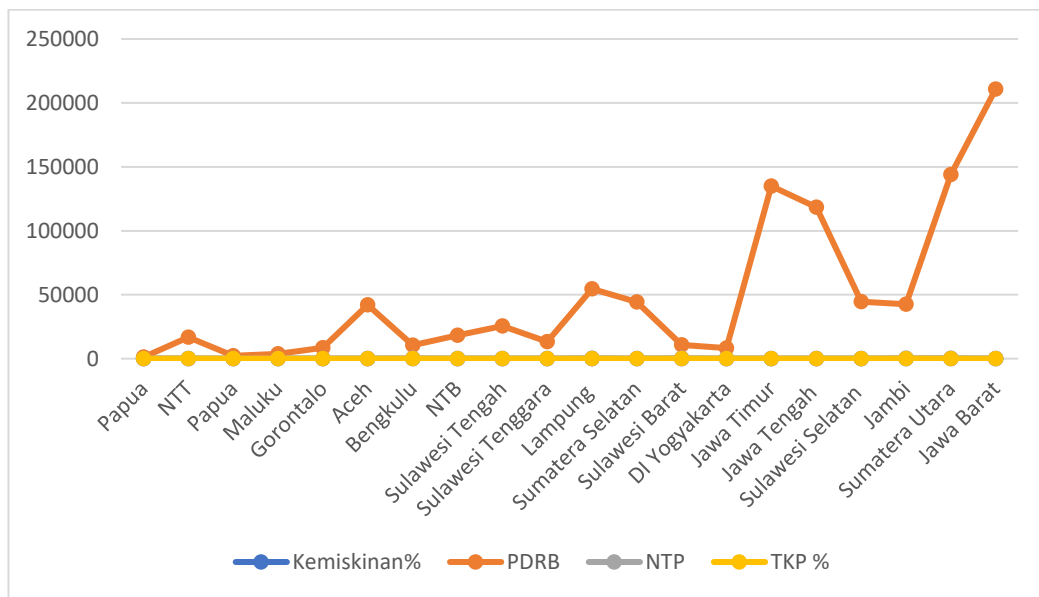
Pemilihan variabel Tenaga Kerja Petani dan Tingkat Pengangguran Terbuka dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan teoritis dan empiris dalam kajian

ekonomi pembangunan. Secara teoritis, model dualisme ekonomi yang dikemukakan oleh W. Arthur Lewis menjelaskan bahwa sektor pertanian tradisional di negara berkembang cenderung menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar namun dengan tingkat produktivitas yang relatif rendah. Kondisi surplus tenaga kerja tersebut menyebabkan rendahnya tingkat upah dan terbatasnya peningkatan pendapatan, sehingga berpotensi mempertahankan kemiskinan struktural. Dalam konteks Indonesia, sektor pertanian masih menjadi sumber mata pencaharian utama bagi sebagian besar penduduk miskin, khususnya di wilayah perdesaan. Oleh karena itu, variabel Tenaga Kerja Petani menjadi relevan untuk menganalisis apakah besarnya penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian mampu berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan atau justru mencerminkan rendahnya produktivitas yang berkorelasi dengan tingginya tingkat kemiskinan.

Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka dipilih karena secara konseptual memiliki hubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme pendapatan. Dalam teori pembangunan yang dikemukakan oleh Michael Todaro dan Stephen C. Smith, keterbatasan kesempatan kerja produktif menjadi salah satu faktor utama yang menghambat peningkatan kesejahteraan dan memperbesar risiko kemiskinan. Pengangguran terbuka mencerminkan ketidakmampuan perekonomian daerah dalam menyerap angkatan kerja secara optimal, sehingga sebagian penduduk tidak memperoleh pendapatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dengan demikian, Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi indikator penting dalam menjelaskan variasi tingkat kemiskinan antarprovinsi, khususnya dalam melihat sejauh mana pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan kesempatan kerja yang inklusif. Berdasarkan landasan teoritis tersebut, penggunaan variabel Tenaga Kerja Petani dan Tingkat Pengangguran Terbuka dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara struktur ketenagakerjaan, kapasitas penyerapan tenaga kerja, dan dinamika kemiskinan antarwilayah di Indonesia.

Namun demikian, pengukuran kemiskinan yang hanya didasarkan pada aspek moneter belum sepenuhnya mampu menggambarkan kondisi kesejahteraan

masyarakat secara komprehensif. (Ratih et al., 2023) Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan multidimensi di Provinsi Lampung tercatat lebih tinggi dibandingkan kemiskinan yang diukur secara moneter, yang menandakan adanya keterbatasan pada aspek pendidikan, kesehatan, serta standar hidup masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa permasalahan kemiskinan tidak semata-mata ditentukan oleh tingkat pendapatan, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia serta akses terhadap layanan dasar.



Sumber: BPS (2024), Data Diolah

### Gambar 1. 2 . Kemiskinan vs Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Nilai Tukar Petani (NTP)

Pada gambar 1.2. tersebut menunjukkan hubungan antara tingkat kemiskinan (%), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Nilai Tukar Petani (NTP) pada 20 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Dari data terlihat bahwa provinsi dengan tingkat kemiskinan sangat tinggi seperti Papua (21,09%) dan NTT (19,02%) memiliki nilai PDRB yang relatif rendah. Selain itu, NTP di Papua (100,26) dan NTT (99,60) juga tidak terlalu tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa rendahnya aktivitas ekonomi daerah dan kesejahteraan petani yang belum optimal dapat berkaitan dengan tingginya tingkat kemiskinan. Di sisi lain, terdapat provinsi dengan PDRB yang besar seperti Jawa Barat (210.828), Sumatera Utara (144.034),

dan Jawa Timur (134.905), namun masih termasuk dalam kelompok provinsi dengan tingkat kemiskinan cukup tinggi. Jika dilihat dari NTP, provinsi-provinsi tersebut memiliki nilai di atas 100, seperti Jawa Barat (112,17) dan Sumatera Utara (136,23), yang menunjukkan bahwa secara umum pendapatan petani relatif lebih baik dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Namun demikian, tingkat kemiskinan belum sepenuhnya rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan petani belum tentu langsung menurunkan kemiskinan secara menyeluruh. Data Badan Pusat Statistik mencatat bahwa ketimpangan distribusi pendapatan antarwilayah masih menjadi tantangan utama dalam upaya penurunan kemiskinan (BPS, 2023a).

Beberapa provinsi seperti Bengkulu memiliki NTP yang sangat tinggi (181,90), tetapi tingkat kemiskinannya masih sebesar 12,52 persen. Begitu juga Jambi dengan NTP 156,14 dan tingkat kemiskinan 7,62 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kesejahteraan petani meningkat, faktor lain seperti struktur ekonomi daerah, kesempatan kerja di luar sektor pertanian, dan pemerataan pendapatan juga berperan dalam menentukan tingkat kemiskinan. Secara umum, data menunjukkan bahwa kenaikan PDRB dan NTP tidak selalu langsung diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan. PDRB yang tinggi maupun NTP yang meningkat belum tentu secara otomatis menurunkan kemiskinan. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan petani, tetapi juga pada pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan perluasan kesempatan kerja di berbagai sektor ekonomi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perbaikan perbandingan harga yang diterima dan dibayarkan belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila tidak disertai dengan peningkatan produktivitas, efisiensi distribusi, serta perluasan akses pasar. (Prabowo & Faridatussalam, 2022).

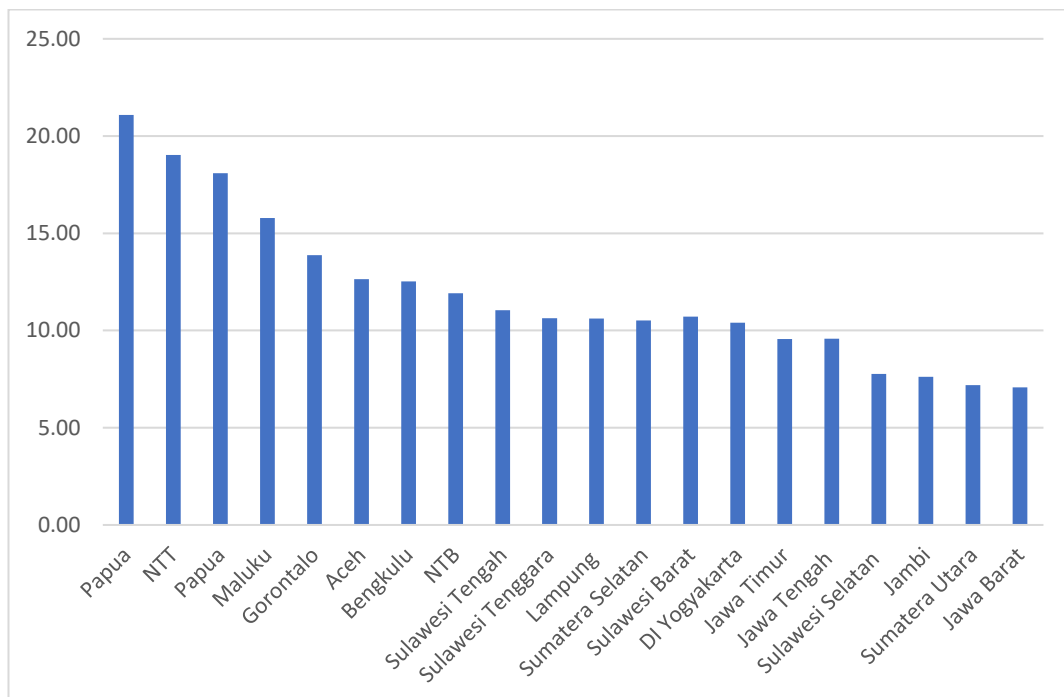
Secara umum, data menunjukkan bahwa kenaikan PDRB dan NTP tidak selalu langsung diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan petani belum tentu secara otomatis mengurangi kemiskinan apabila tidak disertai pemerataan

pendapatan dan kesempatan kerja. Hasil tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Harahap et al., 2022) yang menyatakan bahwa peningkatan PDRB di tingkat daerah tidak secara otomatis menurunkan kemiskinan apabila tidak diiringi dengan pemerataan kesempatan kerja dan distribusi pendapatan. Temuan yang sejalan juga dikemukakan oleh (Putri & Friska, 2024) yang menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi regional memerlukan kualitas dan pemerataan agar mampu memberikan dampak nyata terhadap penurunan kemiskinan.

Pemilihan 20 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa permasalahan kemiskinan di Indonesia tidak tersebar secara merata antarwilayah. Penentuan sampel dilakukan berdasarkan persentase penduduk miskin tahun 2024 yang merupakan tahun terakhir dalam periode observasi penelitian. Tahun 2024 dipilih karena mencerminkan kondisi kemiskinan terkini berdasarkan publikasi resmi *Profil Kemiskinan di Indonesia* yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. Pada tahun tersebut, tingkat kemiskinan nasional berada pada kisaran sekitar 9 persen, sementara 20 provinsi yang dipilih memiliki tingkat kemiskinan di atas atau mendekati 8–10 persen, sehingga relatif berada di atas atau sekitar rata-rata nasional. Kriteria ini digunakan untuk mengidentifikasi wilayah yang hingga akhir periode penelitian masih menghadapi tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dan memerlukan perhatian kebijakan yang lebih terfokus.

Pembatasan sampel pada 20 provinsi juga mempertimbangkan aspek keterwakilan wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Pendekatan penelitian menggunakan data panel dengan model efek tetap bertujuan mengontrol heterogenitas karakteristik antarprovinsi yang tidak dapat diamati secara langsung namun berpotensi memengaruhi tingkat kemiskinan. Dengan demikian, estimasi hubungan antara variabel penelitian diharapkan lebih akurat dalam menangkap perbedaan karakteristik struktural masing-masing wilayah.

Berdasarkan pengelompokan wilayah, sebagian besar provinsi dalam sampel penelitian ini berasal dari Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi, dengan beberapa provinsi lainnya berada di kawasan timur Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi wilayah dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi dalam penelitian ini tidak sepenuhnya terkonsentrasi pada satu kawasan, melainkan tersebar di beberapa wilayah dengan karakteristik struktural yang berbeda. Temuan ini sekaligus mengindikasikan bahwa ketimpangan pembangunan antarwilayah masih menjadi tantangan utama dalam proses pembangunan nasional. Oleh karena itu, analisis yang terfokus pada kelompok provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi menjadi relevan dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran dan berbasis karakteristik daerah.



Sumber: BPS (2024), Data Diolah

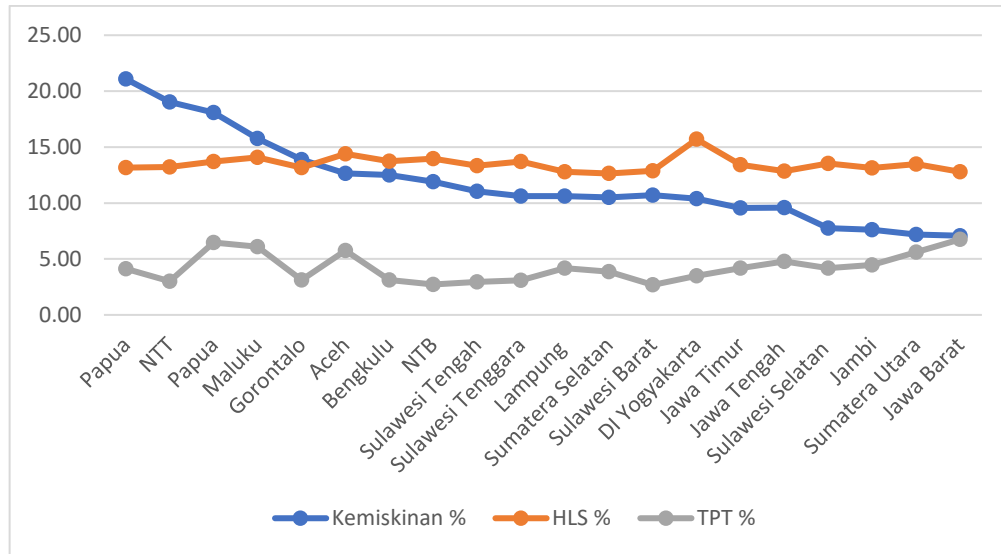
**Gambar 1.3. Persentase Kemiskinan pada 20 Provinsi di Indonesia 2024 (%)**

Gambar 1.3. tersebut menggambarkan persentase penduduk miskin pada 20 provinsi-provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, yang menunjukkan adanya perbedaan tingkat kemiskinan yang cukup signifikan antarwilayah. Provinsi Papua tercatat sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan

tertinggi, yaitu sebesar 21,09 persen, disusul oleh Nusa Tenggara Timur sebesar 19,02 persen dan Papua Barat sebesar 18,09 persen. Tingginya tingkat kemiskinan di provinsi-provinsi tersebut mengindikasikan masih kuatnya permasalahan struktural, antara lain keterbatasan akses terhadap kegiatan ekonomi, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta keterbatasan infrastruktur yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Provinsi lain seperti Maluku, Gorontalo, Aceh, dan Bengkulu juga menunjukkan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, berada pada kisaran 12–16 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa permasalahan kemiskinan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah timur Indonesia, tetapi juga masih terjadi di beberapa provinsi lain dengan karakteristik ekonomi yang berbeda. Meskipun beberapa wilayah memiliki potensi sumber daya alam yang relatif besar, hasil pembangunan belum sepenuhnya dinikmati secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat.

Sementara itu, provinsi-provinsi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Jambi, Sumatera Utara, dan Jawa Barat mencatat tingkat kemiskinan yang relatif lebih rendah dalam kelompok ini, yaitu di bawah 10 persen. Namun demikian, provinsi-provinsi tersebut tetap termasuk dalam kelompok 20 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pembangunan ekonomi di wilayah-wilayah tersebut relatif lebih maju, permasalahan kemiskinan masih menjadi isu yang perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait dengan pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja. Secara keseluruhan, pola pada grafik ini menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi permasalahan utama di berbagai provinsi di Indonesia, dengan karakteristik dan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Kondisi ini menegaskan pentingnya upaya penanggulangan kemiskinan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah, sehingga kebijakan yang diterapkan mampu menjawab permasalahan kemiskinan secara lebih efektif dan berkelanjutan.



Sumber: BPS (2024), Data Diolah

**Gambar 1.4. Kemiskinan vs Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Gambar 1.4 tersebut menggambarkan hubungan antara tingkat kemiskinan (%), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada 20 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, meliputi Papua, Nusa Tenggara Timur, Papua (provinsi pemekaran), Maluku, Gorontalo, Aceh, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Jambi, Sumatera Utara, dan Jawa Barat. (BPS, 2023f).

Sebaliknya, provinsi seperti DI Yogyakarta memiliki nilai HLS tertinggi yaitu 15,70 tahun dengan tingkat kemiskinan sebesar 10,40 persen. Hal ini menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat pendidikan yang lebih baik cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Namun demikian, peningkatan pendidikan tidak selalu langsung berdampak pada penurunan kemiskinan secara signifikan, karena pengaruhnya sangat bergantung pada kemampuan pasar kerja dalam menyerap tenaga kerja berpendidikan. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Harahap et al., 2022) yang menyatakan bahwa pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan, tetapi efeknya terhadap pengurangan kemiskinan bersifat jangka panjang dan dipengaruhi oleh struktur ekonomi daerah.

Jika dilihat dari sisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), terlihat bahwa provinsi dengan kemiskinan tinggi seperti Papua justru memiliki tingkat pengangguran yang tidak terlalu tinggi (4,13%), sedangkan NTT sebesar 3,02 persen. Di sisi lain, Jawa Barat yang memiliki tingkat kemiskinan relatif lebih rendah (7,08%) justru mencatat TPT yang cukup tinggi yaitu 6,75 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pengangguran terbuka tidak selalu mencerminkan rendahnya tingkat kemiskinan, terutama di wilayah yang didominasi oleh pekerjaan informal dan usaha berskala kecil (BPS, 2023f).

Provinsi lain seperti Sumatera Utara (TPT 5,60%) dan Aceh (5,75%) juga menunjukkan tingkat pengangguran yang cukup tinggi dengan tingkat kemiskinan yang masih berada di atas 12 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pekerjaan dan tingkat pendapatan menjadi faktor penting dalam menjelaskan kemiskinan. (Mahfuza et al., 2021) menegaskan bahwa kemiskinan regional dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial ekonomi yang saling berkaitan, termasuk kualitas sumber daya manusia dan struktur pasar tenaga kerja.

Secara umum, pola pada grafik menunjukkan bahwa hubungan antara kemiskinan, pendidikan, dan pengangguran tidak selalu berjalan secara langsung atau linier. Peningkatan tingkat pendidikan yang tercermin dari Harapan Lama Sekolah (HLS) memang dapat memperbesar peluang masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan dalam jangka panjang. Namun demikian, pendidikan yang tinggi belum tentu secara otomatis menurunkan tingkat kemiskinan apabila tidak diiringi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai dan sesuai dengan kualifikasi tenaga kerja. Dalam kondisi tersebut, pengangguran terbuka maupun setengah menganggur tetap dapat terjadi, sehingga sebagian masyarakat masih berada dalam kondisi rentan terhadap kemiskinan.

Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendidikan, tetapi juga dengan struktur dan kapasitas pasar kerja di masing-masing daerah. (Harahap et al., 2022) menyatakan bahwa pengaruh

pendidikan terhadap penurunan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh kemampuan perekonomian daerah dalam menciptakan kesempatan kerja yang produktif. Sementara itu, (Mahfuza et al., 2021) menegaskan bahwa kemiskinan regional merupakan hasil dari berbagai faktor sosial dan ekonomi yang saling berkaitan, termasuk kualitas sumber daya manusia dan kondisi ketenagakerjaan. Oleh karena itu, analisis kemiskinan perlu mempertimbangkan peran HLS dan TPT secara bersama-sama agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika kemiskinan antarwilayah di Indonesia.

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian terhadap tingkat kemiskinan di 20 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi
2. Bagaimana pengaruh Nilai Tukar Petani (NTP) terhadap tingkat kemiskinan di 20 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi
3. Bagaimana pengaruh Tenaga Kerja Petani (TKP) terhadap tingkat kemiskinan di 20 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi
4. Bagaimana Harapan Lama Sekolah (HLS) berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan di 20 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi.
5. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap tingkat kemiskinan di 20 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi
6. Variabel manakah yang paling berpengaruh di antara PDRB sektor pertanian, NTP, Tenaga Kerja Petani (TKP), HLS, dan TPT terhadap tingkat kemiskinan pada 20 provinsi penelitian tersebut

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian terhadap tingkat kemiskinan di 20 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi.
2. Menganalisis pengaruh Nilai Tukar Petani (NTP) terhadap tingkat kemiskinan pada 20 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.

3. Menganalisis pengaruh Tenaga Kerja Petani (TKP) terhadap tingkat kemiskinan pada 20 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.
4. Menganalisis pengaruh Harapan Lama Sekolah (HLS) terhadap tingkat kemiskinan pada 20 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.
5. Menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap tingkat kemiskinan pada 20 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.
6. Mengidentifikasi variabel yang paling dominan memengaruhi tingkat kemiskinan di antara PDRB sektor pertanian, Nilai Tukar Petani (NTP), Tenaga Kerja Petani (TKP), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada 20 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi, baik dari sisi teoritis maupun praktis, sebagai berikut::

1. **Manfaat Teoritis:** Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keterkaitan antara PDRB sektor pertanian, Nilai Tukar Petani (NTP), Tenaga Kerja Petani (TKP), Harapan Lama Sekolah (HLS), serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam memengaruhi tingkat kemiskinan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur akademik terkait faktor-faktor ekonomi dan sosial yang berperan dalam pembentukan kemiskinan, khususnya pada wilayah yang memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap sektor pertanian. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar konseptual bagi studi selanjutnya dalam pengembangan model atau kerangka analisis kemiskinan yang lebih menyeluruh.
2. **Manfaat Praktis:** Menjadi masukan bagi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran untuk menurunkan tingkat kemiskinan melalui peningkatan kinerja sektor pertanian, penguatan daya beli petani, serta perluasan penciptaan lapangan kerja alternatif.. Memberikan informasi dan wawasan bagi masyarakat, khususnya para petani, mengenai faktor-faktor yang

memengaruhi kondisi kemiskinan sehingga dapat mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan rumah tangga tani. Menjadi referensi bagi peneliti atau akademisi lain dalam melakukan kajian lanjutan mengenai isu kemiskinan dan pembangunan sektor pertanian secara berkelanjutan.

## II. KAJIAN PUSTAKA

### 2.1. Kajian Teori

#### 2.1.1. Kemiskinan

##### 2.1.1.1. Pengertian dan Jenis Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan dapat dipahami sebagai kondisi di mana individu atau rumah tangga tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam rangka mempertahankan kehidupan yang layak. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai *“ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari segi pengeluaran”* (BPS, 2024a). Dengan kata lain, seseorang dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan yang ditentukan. Menurut data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS), seseorang atau penduduk dikategorikan miskin apabila pengeluaran konsumsi per kapita (per orang) berada di bawah garis kemiskinan (poverty line) yang ditetapkan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk periode Maret 2025, BPS menetapkan garis kemiskinan sebesar Rp 609.160 per kapita per bulan, atau sekitar, Rp 20.305 per hari (nilai dibagi 30 hari). Artinya, apabila seseorang secara rata-rata mengeluarkan kurang dari Rp 609.160 per bulan (atau kurang dari sekitar Rp 20.300 per hari) untuk memenuhi kebutuhan dasar baik kebutuhan makanan maupun bukan makanan maka ia dikategorikan sebagai penduduk miskin menurut standar nasional BPS (BPS, 2025a). Kondisi tersebut mencerminkan keterbatasan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, layanan kesehatan, dan tempat tinggal. (Hardinandar, 2019). Salah satu indikator sosial dan ekonomi yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan pemerintah di suatu daerah adalah tingkat kemiskinan itu sendiri. (Deby Oktaviana, 2021). Menurut (Pangiuk, 2018) Pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai salah

satu faktor yang dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan sosial dan ekonomi dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Sementara itu, World Bank (2022) menjelaskan bahwa *“poverty is pronounced deprivation in well-being, and comprises many dimensions. It includes low incomes and the inability to acquire the basic goods and services necessary for survival with dignity”* (World Bank, 2025a). Bank Dunia juga menetapkan ukuran kemiskinan ekstrem secara global, yaitu hidup dengan pengeluaran kurang dari US\$2,15 per orang per hari berdasarkan standar *Purchasing Power Parity* (PPP) 2017.

1. **Kemiskinan Absolut:** Kemiskinan absolut merupakan kondisi ketika seseorang tidak memiliki tingkat pendapatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan, seperti pangan, sandang, dan tempat tinggal. Rowntree (1901) menyatakan bahwa *“absolute poverty exists when incomes fall below the minimum necessary for subsistence”* (Rowntree, 1901). Dengan kata lain, ukuran kemiskinan absolut ditentukan oleh garis kebutuhan minimum untuk mempertahankan hidup.
2. **Kemiskinan Relatif:** Kemiskinan relatif menggambarkan kondisi ketika individu telah mampu memenuhi kebutuhan dasar, namun masih dikategorikan miskin karena tingkat kesejahteraannya berada jauh di bawah rata-rata masyarakat di sekitarnya. (Townsend, 1982) menjelaskan bahwa *“individuals can be said to be in poverty when they lack the resources to obtain the type of diet, participate in the activities, and have the living conditions which are customary in the society to which they belong”* (Townsend, 1982) Artinya, kemiskinan relatif lebih menekankan pada keterbatasan dalam partisipasi sosial akibat perbedaan standar hidup.
3. **Kemiskinan Struktural:** Kemiskinan struktural merupakan bentuk kemiskinan yang muncul sebagai akibat dari ketimpangan dan ketidakadilan dalam struktur sosial, ekonomi, maupun politik. Gunnar Myrdal (1971) berpendapat bahwa *“poverty in developing countries is not merely the result of individual deficiencies but a consequence of structural inequalities in society”* (MYRDAL, 1971). Dengan demikian, kondisi kemiskinan ini tidak semata-mata disebabkan oleh faktor individu, tetapi lebih merupakan akibat dari sistem yang belum

mampu menyediakan kesempatan yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat.

4. **Kemiskinan Kultural:** Kemiskinan kultural terjadi karena adanya nilai, budaya, dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun sehingga melanggengkan kemiskinan. Oscar Lewis (1960) memperkenalkan konsep *culture of poverty* dan menyatakan bahwa *“the culture of poverty perpetuates itself, passing from generation to generation along family lines”* (O. Lewis, 1966) Artinya, kemiskinan ini terbentuk karena sikap pasrah, rendahnya motivasi, serta enggan berusaha untuk memperbaiki kualitas hidup.
5. **Kemiskinan Alamiah:** Kemiskinan kemiskinan alamiah terjadi akibat keterbatasan sumber daya alam serta kondisi geografis yang kurang mendukung aktivitas dan produktivitas ekonomi. Suharto (2009) menjelaskan bahwa *“kemiskinan alamiah terjadi di wilayah yang memiliki keterbatasan sumber daya, seperti tanah yang tandus, kondisi iklim ekstrem, atau lokasi geografis yang terisolasi”* (Suharto, 2009). Oleh karena itu, kemiskinan ini lebih dipengaruhi oleh faktor lingkungan dibandingkan faktor sosial-ekonomi. tusional
6. **Kemiskinan Situasional (Temporer):** Kemiskinan situasional adalah kemiskinan yang dialami seseorang atau kelompok masyarakat karena adanya guncangan tertentu seperti bencana alam, konflik, atau krisis ekonomi. Todaro dan Smith (2000) menyebut bahwa *“situational poverty arises from temporary adverse events such as natural disasters, economic crisis, or sudden unemployment”* (Todaro & Smith, 2015). Dengan demikian, kemiskinan situasional bersifat sementara dan dapat pulih apabila kondisi sosial-ekonomi kembali stabil.

#### **2.1.1.2. Teori Kemiskinan**

##### **a. Teori Dualisme Ekonomi**

Lewis (1954) Menjelaskan bahwa perekonomian di negara berkembang memiliki struktur yang terbagi ke dalam dua sektor utama, yaitu sektor tradisional dan sektor modern. Sektor tradisional umumnya ditandai oleh tingkat produktivitas yang rendah, kelebihan pasokan tenaga kerja, serta upah yang relatif kecil, sedangkan sektor modern memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi serta upah yang

relatif lebih besar baik. Dominasi tenaga kerja pada sektor tradisional dengan produktivitas rendah menyebabkan pendapatan masyarakat sulit meningkat, sehingga kemiskinan tetap bertahan meskipun sebagian besar penduduk telah bekerja. (W. A. Lewis, 1954).

#### **b. Teori Kebutuhan Dasar (Basic Needs Theory)**

Menurut International Labour Organization (ILO, 1976), Kemiskinan dapat dipahami sebagai kondisi ketika individu atau rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Terbatasnya akses terhadap pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut mencerminkan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, meskipun individu atau rumah tangga telah memiliki pekerjaan. Oleh karena itu, kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan ketiadaan pekerjaan, tetapi juga erat hubungannya dengan kualitas pendapatan serta akses terhadap layanan dasar. (Organization, 1976).

#### **2.1.1.3. Penyebab Kemiskinan**

Kemiskinan tidak semata-mata dipandang sebagai keterbatasan pendapatan, tetapi juga sebagai kondisi multidimensi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat struktural maupun non-struktural. Bourguignon, (2003) menyatakan bahwa kemiskinan mencakup keterbatasan dalam pendidikan, kesehatan, serta akses terhadap sumber daya. Melalui pendekatan (Sen, 1999) menekankan bahwa kemiskinan muncul akibat keterbatasan kemampuan individu dalam mencapai kesejahteraan dasar. Oleh karena itu, kemiskinan tidak hanya dinilai dari aspek ekonomi semata, tetapi juga dari ketidakmampuan individu dalam menjalankan fungsi kehidupan yang layak. Badan Pusat Statistik (2024) menambahkan bahwa penyebab kemiskinan di Indonesia berkaitan dengan rendahnya kualitas pendidikan, buruknya kondisi kesehatan, keterbatasan kepemilikan aset, dan akses yang tidak merata terhadap infrastruktur. Pandangan tersebut sejalan dengan (World Bank, 2022) yang menegaskan bahwa kemiskinan berkaitan erat dengan rendahnya produktivitas tenaga kerja, ketimpangan dalam distribusi aset, terbatasnya peluang ekonomi, serta lemahnya sistem perlindungan sosial.

Selain itu, sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa faktor sosial-ekonomi juga berkontribusi signifikan terhadap tingginya kemiskinan. menyebutkan bahwa kemiskinan kronis dipengaruhi oleh usia, status pekerjaan, tingkat pendidikan, ukuran rumah tangga, serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar (Sugiharti et al., 2022). (Wang et al., 2023) menekankan pentingnya modal sosial, di mana jaringan sosial dan rasa saling percaya dapat mengurangi risiko kemiskinan, sementara ketergantungan pada pendapatan pertanian justru memperbesar kerentanan ekonomi.

#### **2.1.1.4. Metode Perhitungan Garis Kemiskinan Makanan**

Penentuan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan tahap pertama dalam penghitungan garis kemiskinan. GKM dihitung berdasarkan nilai kebutuhan minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Standar ini ditetapkan dengan mengacu pada pola konsumsi penduduk referensi yang diperoleh dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Dalam proses perhitungannya, terlebih dahulu ditentukan komoditas makanan utama yang umum dikonsumsi masyarakat, seperti beras, telur, ikan, minyak goreng, dan komoditas pangan lainnya. Selanjutnya dihitung jumlah konsumsi masing-masing komoditas yang setara dengan kebutuhan energi 2.100 kilokalori per hari, kemudian dikalikan dengan harga rata-rata komoditas tersebut di masing-masing wilayah. Secara sederhana, Garis Kemiskinan Makanan dapat dirumuskan sebagai penjumlahan dari hasil perkalian antara jumlah konsumsi setiap komoditas dengan harga rata-ratanya.

$$GKM = \sum(\text{Jumlah konsumsi} \times \text{Harga})$$

#### **2.1.1.5. Metode Perhitungan Kemiskinan Non – Makanan**

Setelah menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM), tahap berikutnya adalah menentukan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). GKNM mencerminkan kebutuhan dasar selain makanan yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan yang layak. Komponen ini meliputi kebutuhan perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, transportasi, serta kebutuhan dasar lainnya yang umum dikonsumsi masyarakat. Penentuan GKNM dilakukan dengan menghitung rata-rata

pengeluaran non-makanan dari kelompok penduduk referensi yang tingkat konsumsinya berada di sekitar garis kemiskinan. Data tersebut diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Secara konseptual, GKNM dihitung sebagai penjumlahan nilai pengeluaran minimum untuk berbagai komoditas dan layanan non-makanan yang dianggap esensial. Dengan demikian, total garis kemiskinan diperoleh dari penjumlahan antara Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non-Makanan, yang secara matematis dirumuskan sebagai:

$$GK = GKM + GKNM$$

Penduduk dikategorikan sebagai miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah nilai garis kemiskinan yang telah ditetapkan. Karena mempertimbangkan perbedaan harga dan pola konsumsi antarwilayah, nilai garis kemiskinan dapat berbeda pada setiap provinsi maupun antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

#### **2.1.1.6. Metode Perhitungan Kemiskinan**

Komponen pertama dalam pengukuran kemiskinan adalah Garis Kemiskinan Makanan (GKM), yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan energi minimum sebesar 2.100 kilokalori per kapita per hari. Kebutuhan energi tersebut dipenuhi melalui rata-rata konsumsi 52 jenis komoditas pangan yang dianggap esensial bagi penduduk miskin. Komponen selanjutnya adalah Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), yang mencakup kebutuhan dasar di luar pangan, seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi dasar. Penjumlahan antara GKM dan GKNM selanjutnya digunakan untuk menentukan Garis Kemiskinan (GK).

Perhitungan Kemiskinan oleh BPS (Garis Kemiskinan Nasional)

$$GK = GKM + GKNM$$

Keterangan:

GK: Garis Kemiskinan

GKM: Garis Kemiskinan Makanan

GKNM: Garis Kemiskinan Non – Makanan

Seseorang diklasifikasikan sebagai penduduk miskin apabila tingkat pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan yang telah ditetapkan

berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk periode Maret 2025, BPS menetapkan garis kemiskinan sebesar Rp 609.160 per kapita per bulan, atau sekitar, Rp 20.305 per hari (nilai dibagi 30 hari). Artinya, apabila seseorang secara rata-rata mengeluarkan kurang dari Rp 609.160 per bulan (atau kurang dari sekitar Rp 20.300 per hari) untuk memenuhi kebutuhan dasar baik kebutuhan makanan maupun bukan makanan maka ia dikategorikan sebagai penduduk miskin menurut standar nasional BPS (BPS, 2025a). Selain itu, Badan Pusat Statistik juga menerapkan tiga indikator turunan untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi kemiskinan. Indikator tersebut meliputi *Headcount Index* ( $P_0$ ) yang menunjukkan persentase penduduk miskin, *Poverty Gap Index* ( $P_1$ ) yang mencerminkan rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, serta *Poverty Severity Index* ( $P_2$ ) yang mengukur tingkat ketimpangan di antara kelompok penduduk miskin itu sendiri (Badan Pusat Statistik, 2024).

#### **2.1.1.7. Indikator Kemiskinan**

Indikator kemiskinan merupakan ukuran yang digunakan untuk menggambarkan tingkat, kedalaman, dan tingkat keparahan kemiskinan dalam suatu wilayah. Indikator ini penting agar analisis kemiskinan tidak hanya sebatas jumlah penduduk miskin, tetapi juga mencakup kondisi kesejahteraan relatif dari kelompok masyarakat miskin tersebut. Menurut Badan Pusat Statistik (2024), terdapat tiga indikator utama kemiskinan. Pertama, *Headcount Index* ( $P_0$ ) yaitu persentase penduduk miskin, dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan terhadap total penduduk. Kedua, *Poverty Gap Index* ( $P_1$ ) yang mengukur kedalaman kemiskinan, yaitu rata-rata kesenjangan antara pengeluaran penduduk miskin dan garis kemiskinan. Ketiga, *Poverty Severity Index* ( $P_2$ ) digunakan untuk menilai tingkat keparahan kemiskinan dengan mempertimbangkan derajat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin, di mana nilai indeks yang semakin besar menunjukkan semakin tingginya ketimpangan pengeluaran dalam kelompok penduduk miskin.(BPS, 2024a).

Sejalan dengan pandangan tersebut, World Bank (2022) menegaskan pentingnya penggunaan indikator kemiskinan multidimensi yang tidak hanya didasarkan pada pendapatan, tetapi juga mempertimbangkan akses terhadap pendidikan, layanan

kesehatan, air bersih, serta berbagai pelayanan dasar lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran kemiskinan seharusnya tidak terbatas pada aspek ekonomi semata, melainkan juga memperhatikan bentuk-bentuk deprivasi sosial yang dialami masyarakat. Oleh karena itu, indikator kemiskinan memiliki peran strategis sebagai dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih menyeluruh dan tepat sasaran. (World Bank, 2022).

## **2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto**

### **2.1.2.1. Definisi dan Jenis Produk Domestik Regional Bruto**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator penting dalam analisis ekonomi wilayah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2024b). PDRB didefinisikan sebagai *“jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu, biasanya satu tahun atau triwulan, yang dihitung atas dasar harga berlaku maupun harga konstan”* (BPS, 2024). Definisi ini menegaskan bahwa PDRB merupakan gambaran kinerja ekonomi suatu daerah dan digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan.

Ada Tiga Jenis Produk Domestik Bruto

1. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB): PDRB ADHB adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada tahun berjalan. Jenis ini mencerminkan nilai nominal ekonomi suatu daerah dan berguna untuk melihat kontribusi sektoral serta membandingkan ukuran ekonomi antarwilayah. Namun, indikator ini belum mencerminkan pertumbuhan riil karena masih terpengaruh inflasi (Sukirno, 2016).
2. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK): DRB ADHK dihitung dengan menggunakan harga pada tahun dasar tertentu. Tujuannya adalah menghilangkan pengaruh perubahan harga sehingga dapat menggambarkan pertumbuhan ekonomi riil. Todaro dan Smith (2020) menegaskan bahwa harga konstan memungkinkan analisis terhadap perkembangan volume produksi barang dan jasa secara murni, sehingga lebih akurat untuk menilai pertumbuhan ekonomi.

3. Produk Domestik Bruto Per Kapita: PDRB per kapita diperoleh dengan membagi total PDRB dengan jumlah penduduk suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan rata-rata pendapatan penduduk dan sering dipakai sebagai ukuran tingkat kesejahteraan. Menurut Sukirno (2016), semakin tinggi PDRB per kapita maka semakin baik tingkat kemakmuran masyarakat, meskipun pemerataan pendapatan tetap perlu diperhatikan (Sukirno, 2016).

### 2.1.2.2. Metode Perhitungan Produk Regional Domestik Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dihitung melalui tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan.

#### 1. Pendekatan Produksi

Pendekatan ini menghitung PDRB berdasarkan jumlah nilai tambah bruto dari seluruh lapangan usaha dalam suatu wilayah. Nilai tambah diperoleh dari selisih antara nilai output dengan biaya antara (intermediate cost). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), pendekatan produksi merupakan metode yang paling sering digunakan karena mampu menggambarkan kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap total PDRB (BPS, 2024b).

$$PDRB = \sum (Output - Biaya\; Antara)$$

Keterangan:

Output : Nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu sektor

Biaya Antara : Biaya input yang digunakan dalam proses produksi

Selisihnya disebut Nilai Tambah Bruto (NTB), dan penjumlahan seluruh NTB sektor: PDRB

#### 2. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran menghitung PDRB dari sisi permintaan akhir, yaitu jumlah total pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan persediaan, serta ekspor neto yang merupakan selisih antara ekspor dan impor. Todaro dan Smith (2020) menjelaskan bahwa metode ini berguna untuk melihat pola konsumsi, investasi,

dan perdagangan suatu daerah sehingga dapat dianalisis keseimbangan permintaan agregat.

$$PDRB = C + I + G + (X - M)$$

Keterangan:

*C (Consumption)* : Konsumsi rumah tangga dan Lembaga non-profit

*I (Investment)* : Pembentukan modal tetap bruto + perubahan inventori

*G (Government)* : Pengeluaran pemerintah

*X - M (Net Export)*: Ekspor barang/ jasa dikurangi impor

### 3. Pendekatan Pendapatan

Metode ini menghitung PDRB dari sisi distribusi pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi, seperti upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan, serta pajak tidak langsung neto. Sukirno (2016) menekankan bahwa pendekatan pendapatan berguna untuk mengetahui bagaimana distribusi pendapatan dari aktivitas ekonomi tersebar kepada masyarakat.

$$PDRB = \text{Upah}; \text{ dan}; \text{ Gaji} + \text{Surplus}; \text{ Usaha} + \text{Penyusutan} \\ + \text{Pajak}; \text{ Tidak}; \text{ Langsung}; \text{ Neto}$$

Keterangan:

Upah dan Gaji : Kompensasi Tenaga Kerja

Surplus Usaha : Keuntungan pemilik modal dan usaha

Penyusutan : Depresiasi barang modal

Pajak Tidak Langsung Neto : Pajak atas produk dan produksi dikurangi subsidi

#### 2.1.2.3. Indikator Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator utama dalam menganalisis kondisi dan kinerja perekonomian suatu daerah. Menurut BPS (2024), PDRB tidak hanya digunakan untuk mengukur besarnya nilai tambah yang dihasilkan suatu wilayah, tetapi juga sebagai dasar untuk menghitung berbagai indikator turunan yang merepresentasikan kesejahteraan masyarakat dan kapasitas ekonomi daerah.

1. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi: Pertumbuhan ekonomi diukur dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK). Indikator ini menggambarkan perubahan riil output ekonomi tanpa dipengaruhi inflasi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan peningkatan kapasitas produksi suatu daerah (BPS, 2024b).
2. Kontribusi atau Struktur Ekonomi: Struktur ekonomi menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam membentuk total PDRB. Indikator ini dihitung dengan cara membandingkan nilai tambah bruto suatu lapangan usaha terhadap total PDRB. Analisis struktur ekonomi penting untuk mengetahui sektor dominan yang menopang perekonomian daerah (Tambunan, 2001).
3. PDRB per kapita: PDRB per kapita diperoleh dari pembagian total PDRB dengan jumlah penduduk di suatu wilayah. Indikator ini menggambarkan rata-rata output atau pendapatan per penduduk. Meskipun bukan ukuran langsung kesejahteraan, indikator ini banyak digunakan untuk melihat tingkat kemakmuran masyarakat (Jannah, M., & Setiawan, 2021)
4. Pendapatan Regional Riil per Kapita: Indikator ini merupakan turunan dari PDRB per kapita atas dasar harga konstan, sehingga lebih mencerminkan daya beli masyarakat dibandingkan PDRB per kapita atas harga berlaku (ADHB). Indikator ini penting dalam mengukur kemajuan pembangunan yang sesungguhnya (Kuncoro, 2003).

### **2.1.3. Nilai Tukar Petani**

#### **2.1.3.1. Pengertian dan Jenis Nilai Tukar Petani**

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator kesejahteraan petani yang banyak digunakan dalam analisis pembangunan pertanian. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2022), NTP adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib), kemudian dikalikan 100. Dengan kata lain, NTP mengukur daya tukar hasil produksi pertanian yang dijual petani terhadap barang dan jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga maupun biaya produksi pertanian. NTP digunakan sebagai indikator sederhana untuk melihat tingkat kemampuan daya beli petani. Jika nilai NTP lebih dari 100, berarti petani mengalami surplus karena harga hasil pertanian yang diterima lebih

besar dibandingkan harga barang dan jasa yang dibeli. Sebaliknya, jika NTP kurang dari 100, menunjukkan bahwa petani mengalami defisit atau penurunan kesejahteraan (MUBYARTO, 1989). Selain itu, NTP tidak hanya mencerminkan kondisi ekonomi rumah tangga petani, tetapi juga menjadi indikator makro dalam menilai kinerja pembangunan sektor pertanian di suatu wilayah. Oleh karena itu, pemerintah menjadikan NTP sebagai salah satu ukuran keberhasilan program pembangunan pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani (S Wahyuni, 2020). Menurut BPS (2023), NTP tidak hanya dihitung secara umum untuk seluruh petani, tetapi juga dibedakan menurut subsektor pertanian. Hal ini dilakukan karena struktur produksi, konsumsi, dan pola pengeluaran petani berbeda-beda antar subsektor. Jenis-jenis NTP tersebut adalah:

1. NTP Tanaman Pangan (NTPP): NTP subsektor ini mencakup petani yang mengusahakan tanaman bahan makanan pokok, seperti padi dan palawija. NTPP sangat dipengaruhi oleh harga gabah di tingkat petani, harga pupuk, serta barang konsumsi rumah tangga.
2. NTP Hortikultura (NTPH): NTP subsektor hortikultura meliputi petani sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias. Fluktuasi harga pada subsektor ini cenderung lebih tinggi dibandingkan tanaman pangan karena sangat dipengaruhi musim, distribusi, dan permintaan pasar.
3. NTP Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR): Subjeknya adalah petani yang mengusahakan komoditas perkebunan seperti kelapa sawit, karet, kopi, kakao, dan kelapa. Perubahan harga komoditas perkebunan internasional sangat memengaruhi NTPR.
4. NTP Peternakan (NTPT): NTP subsektor peternakan mencakup petani yang bergerak di bidang ternak besar (sapi, kerbau), ternak kecil (kambing, domba), serta unggas. Faktor penentu utamanya adalah harga pakan, bibit, serta harga jual ternak dan produk olahannya (daging, telur, susu).
5. NTP Perikanan (NTPI) Dibedakan lagi menjadi dua: NTP Perikanan Tangkap mencakup nelayan yang menggantungkan hidup pada hasil tangkapan laut atau perairan darat. Dan NTP Perikanan Budidaya mencakup pembudidaya ikan, udang, rumput laut, dan biota perairan lainnya.

### **2.1.3.2. Indikator Nilai Tukar Petani**

1. Indeks Harga yang Diterima Petani (It): Indeks Harga yang Diterima Petani (It) merupakan ukuran yang menunjukkan perkembangan harga berbagai komoditas pertanian yang dijual oleh petani. Indeks ini mencerminkan pendapatan petani dari hasil produksi yang diusahakan. Kenaikan It menandakan adanya peningkatan harga jual produk pertanian, sehingga berpotensi meningkatkan kesejahteraan petani. Sebaliknya, penurunan It mencerminkan melemahnya harga jual hasil produksi petani di pasar (BPS, 2022).
2. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib): Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) menggambarkan besarnya pengeluaran yang harus ditanggung petani untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun biaya produksi. Komponen ini meliputi biaya konsumsi rumah tangga (non-produksi) dan biaya usaha tani (produksi). Peningkatan Ib menunjukkan adanya tekanan biaya terhadap petani, baik dari sisi konsumsi maupun produksi, yang dapat mengurangi daya beli mereka (S Wahyuni, 2020)
3. Nilai Tukar Petani (NTP): NTP sendiri merupakan indikator kesejahteraan petani yang dihitung melalui perbandingan antara It dan Ib. Jika nilai NTP lebih dari 100, artinya petani memiliki surplus karena pendapatan dari hasil produksi lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi dan biaya produksi. Sebaliknya, jika NTP kurang dari 100 berarti petani mengalami defisit, sehingga kesejahteraan mereka menurun (MUBYARTO, 1989)

### **2.1.4. Tenaga Kerja Petani**

#### **2.1.4.1 Pengertian dan Jenis Tenaga Kerja Petani**

Tenaga kerja petani merupakan bagian dari angkatan kerja yang bekerja pada sektor pertanian, baik sebagai petani pemilik, penggarap, buruh tani, maupun pekerja keluarga tanpa upah. Badan Pusat Statistik (BPS, 2023c) mendefinisikan tenaga kerja pertanian sebagai individu yang bekerja pada bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan perkebunan, baik dalam kegiatan produksi utama maupun kegiatan pendukung. Menurut Todaro dan Smith (2015), tenaga kerja pertanian adalah kelompok pekerja yang menyumbangkan tenaga fisik maupun non-fisik dalam

proses produksi pangan dan komoditas pertanian, yang perannya sangat penting dalam menjamin ketahanan pangan serta sebagai penopang pembangunan pedesaan (Todaro & Smith, 2015). Sementara itu, bahwa tenaga kerja petani tidak hanya mencakup mereka yang mengelola lahan secara langsung, tetapi juga termasuk buruh tani musiman yang keberadaannya bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan produksi, seperti masa tanam atau panen (Arsyad, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja pertanian memiliki karakteristik unik dibandingkan sektor lain karena erat kaitannya dengan siklus produksi dan ketergantungan pada kondisi alam. Tenaga kerja petani dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan status dan sifat pekerjaannya.

1. Petani pemilik lahan: yaitu mereka yang memiliki lahan pertanian dan mengelolanya sendiri untuk kepentingan produksi. Kelompok ini umumnya memiliki akses lebih besar terhadap faktor produksi, meskipun luas lahan yang dikelola sering kali relatif kecil di negara berkembang, termasuk Indonesia (Arsyad, 2015).
2. Petani penggarap: yaitu tenaga kerja pertanian yang tidak memiliki lahan tetapi mengelola lahan milik orang lain dengan sistem bagi hasil atau sewa. Petani penggarap memiliki posisi yang rentan terhadap ketidakpastian hasil panen dan harga, karena keterbatasan aset produktif (Soekartawi, 2007)
3. Buruh tani: yaitu tenaga kerja yang bekerja pada pemilik atau penggarap lahan dengan menerima upah, baik berupa uang maupun hasil panen. Buruh tani dapat dibedakan lagi menjadi buruh tani tetap yang bekerja secara terus-menerus pada satu pemilik lahan, dan buruh tani musiman yang hanya bekerja pada periode tertentu seperti masa tanam atau panen (Sajogyo, 1989).
4. Tenaga kerja keluarga tanpa upah: yaitu anggota keluarga yang membantu dalam kegiatan pertanian tanpa menerima imbalan langsung. Menekankan bahwa kelompok ini sering kali luput dari perhitungan formal tenaga kerja, padahal kontribusinya cukup besar dalam keberlangsungan usaha tani rumah tangga (Todaro & Smith, 2015).

#### **2.1.4.2. Indikator Tenaga Kerja Petani**

Indikator tenaga kerja petani dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan kondisi ketenagakerjaan di sektor pertanian yang berkaitan dengan tingkat kemiskinan di Indonesia. Terdapat 4 Indikator Tenaga Kerja Petani yaitu:

1. Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja Petani: Sektor pertanian masih berperan sebagai salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan bahwa pada Februari 2023 sekitar 28 persen tenaga kerja nasional terserap di sektor pertanian. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) cenderung menurun, sektor ini tetap menjadi sumber penghidupan utama bagi sebagian besar penduduk berpendapatan rendah. Dengan demikian, dinamika ketenagakerjaan di sektor pertanian memiliki peranan penting dalam menjelaskan variasi tingkat kemiskinan antarwilayah di Indonesia. (BPS, 2023c).
2. Status Pekerjaan: Status pekerjaan merupakan indikator penting dalam menggambarkan kondisi tenaga kerja petani. Soekartawi (2007) menjelaskan bahwa status petani dapat berupa pemilik lahan, penggarap, buruh tani tetap, maupun buruh tani musiman. Perbedaan status pekerjaan tersebut berimplikasi langsung terhadap tingkat pendapatan, kepastian kerja, dan risiko kemiskinan. Tenaga kerja dengan status buruh tani musiman, misalnya, cenderung memiliki pendapatan yang tidak menentu sehingga lebih rentan terhadap kondisi kemiskinan dibandingkan petani pemilik lahan (Soekartawi, 2007).
3. Pendapatan Tenaga Kerja Petani: Pendapatan tenaga kerja petani sering dijadikan indikator utama dalam menilai tingkat kesejahteraan rumah tangga. Rendahnya tingkat pendapatan petani menjadi salah satu faktor yang turut berperan dalam mendorong tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Kondisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan rendahnya produktivitas, tetapi juga dipengaruhi oleh ketidakstabilan harga komoditas pertanian, terbatasnya akses terhadap pasar, serta lemahnya posisi tawar petani dalam rantai distribusi. (Sajogyo, 1989).
4. Produktivitas Tenaga Kerja: Produktivitas tenaga kerja petani diukur dari perbandingan antara output pertanian yang dihasilkan dengan jumlah tenaga

kerja atau jam kerja yang digunakan. Produktivitas pertanian di Indonesia masih relatif rendah, antara lain akibat keterbatasan penggunaan teknologi, minimnya akses modal, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Rendahnya produktivitas ini berdampak langsung pada rendahnya pendapatan dan memperbesar risiko kemiskinan. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas menjadi salah satu kunci dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan (Arsyad, 2015).

5. **Jam Kerja dan Pola Kerja:** Tenaga kerja petani umumnya memiliki jam kerja yang tidak stabil karena dipengaruhi oleh musim tanam dan panen. Sifat pekerjaan yang musiman menyebabkan pendapatan rumah tangga petani bersifat fluktuatif. Untuk menjaga kestabilan pendapatan, sebagian tenaga kerja pertanian melakukan diversifikasi pekerjaan di luar sektor pertanian. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pertanian sering kali belum mampu menyediakan kesempatan kerja yang berkelanjutan dan berpenghasilan layak, sehingga berkontribusi terhadap kerentanan kemiskinan (Todaro & Smith, 2015).
6. **Akses Terhadap Faktor Produksi dan Pelatihan:** Akses terhadap faktor produksi seperti lahan, modal, teknologi, serta pelatihan kerja merupakan indikator penting dalam meningkatkan kapasitas tenaga kerja pertanian. Chambers (1983) menekankan bahwa keterbatasan akses terhadap faktor produksi akan menghambat peningkatan produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja. Tanpa dukungan akses yang memadai, tenaga kerja pertanian sulit keluar dari kondisi berpendapatan rendah. Oleh karena itu, peningkatan akses terhadap faktor produksi dan pelatihan menjadi penting dalam upaya pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan. (Chambers, 1983)

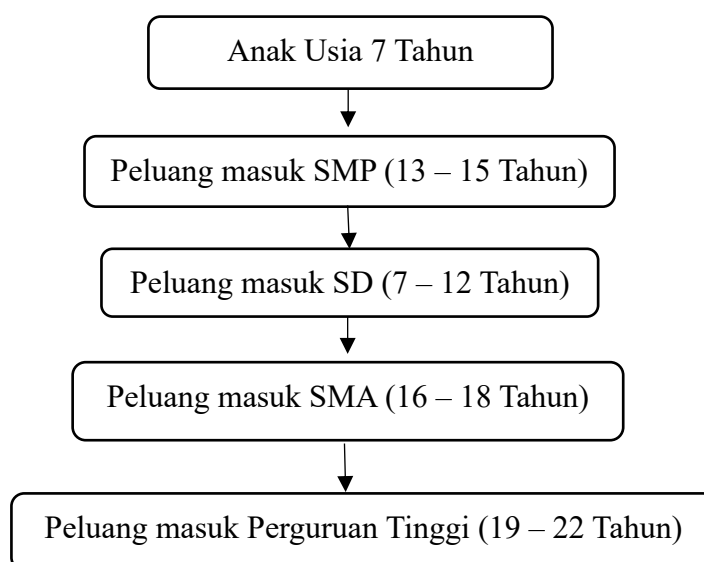
### **2.1.5. Harapan Lama Sekolah**

#### **2.1.5.1 Pengertian Harapan lama sekolah**

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan salah satu indikator penting dalam bidang pendidikan yang menggambarkan potensi lama pendidikan formal yang dapat ditempuh oleh anak-anak pada usia sekolah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2023b), HLS didefinisikan sebagai rata-rata lama tahun sekolah yang diharapkan akan dijalani oleh anak berusia tujuh tahun ke depan dengan asumsi

bahwa pola partisipasi sekolah pada saat ini tetap berlaku. Indikator ini tidak mengukur pencapaian pendidikan aktual, melainkan lebih pada harapan atau potensi pendidikan yang bisa dicapai oleh generasi mendatang. HLS merupakan salah satu komponen dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merefleksikan akses masyarakat terhadap pendidikan. Dengan demikian, HLS digunakan untuk menilai sejauh mana suatu negara atau wilayah menyediakan kesempatan pendidikan bagi warganya, serta menjadi instrumen untuk memantau ketimpangan pendidikan antarwilayah maupun antar kelompok sosial (Development, 2022).

#### 2.1.5.2. Perhitungan Harapan Lama Sekolah



Sumber: BPS (2023)

#### Gambar 2. 1. Perhitungan Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator yang menggambarkan rata-rata lama tahun sekolah yang diharapkan dapat ditempuh oleh seorang anak sejak usia 7 tahun pada kondisi yang berlaku saat ini. Perhitungan HLS dimulai dari asumsi seorang anak berusia 7 tahun yang memiliki peluang untuk melanjutkan pendidikan hingga usia 22 tahun. Pada tahap awal, peluang bersekolah dihitung berdasarkan tingkat partisipasi sekolah pendidikan pada seluruh jenjang, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga pendidikan

tinggi. Selanjutnya, peluang-peluang tersebut dijumlahkan untuk menggambarkan akumulasi harapan lama sekolah yang dapat ditempuh. Misalnya, jika seorang anak memiliki probabilitas penuh untuk menyelesaikan pendidikan dasar (6 tahun), sebagian peluang untuk melanjutkan ke SMP (3 tahun), dan sebagian lagi untuk SMA serta perguruan tinggi, maka keseluruhan jumlah tahun tersebut membentuk angka HLS. Oleh karena itu, HLS menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pembangunan sumber daya manusia, karena semakin tinggi nilai HLS menunjukkan semakin baik akses serta kesempatan pendidikan yang tersedia bagi masyarakat (BPS, 2023b).

Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung dengan menjumlahkan peluang bersekolah yang dimiliki oleh anak pada setiap usia, mulai dari usia 7 tahun hingga 22 tahun. Secara matematis, HLS dirumuskan sebagai:

$$HLS = \sum_{x=a_0}^{a_1} \frac{E_x}{P_x}$$

Keterangan:

$a_0$ : usia awal perhitungan, yaitu 7 tahun

$a_1$ : usia akhir perhitungan, yaitu 22 tahun

$E_x$ : jumlah penduduk usia  $x$  yang masih bersekolah,

$P_x$ : jumlah penduduk usia  $x$

$E_x/P_x$ : merupakan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada usia  $x$

Dengan demikian, nilai HLS diperoleh dari penjumlahan seluruh rasio partisipasi sekolah pada setiap usia dalam rentang 7 hingga 22 tahun.

Apabila data APS hanya tersedia menurut kelompok umur atau jenjang pendidikan, maka perhitungan HLS dapat dilakukan dengan pendekatan:

$$HLS = \sum_1 \left( \frac{APS_1}{D_1} \right)$$

Keterangan:

$APS_1$  : adalah rata-rata angka partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan I

$D_1$  : adalah durasi atau lama pendidikan pada jenjang tersebut (SD = 6 tahun, SMP = 3 tahun, SMA = 3 tahun, Perguruan Tinggi = ±4 tahun).

Dengan menggunakan kedua pendekatan tersebut, HLS mencerminkan jumlah tahun sekolah yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak berdasarkan pola partisipasi sekolah yang berlaku saat ini.

## **2.1.6. Tingkat Pengangguran Terbuka**

### **2.1.6.1. Pengertian dan Jenis Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang menggambarkan persentase penduduk yang belum bekerja terhadap total angkatan kerja. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2023b) mendefinisikan pengangguran terbuka sebagai penduduk usia kerja yang tergolong dalam angkatan kerja dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, atau tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak memiliki peluang untuk memperoleh pekerjaan. Oleh karena itu, TPT mencerminkan besarnya proporsi angkatan kerja yang belum terserap dalam aktivitas ekonomi. Todaro dan Smith (2015) menyatakan bahwa pengangguran terbuka sering digunakan sebagai indikator makro untuk menilai kondisi pasar tenaga kerja, karena angka tersebut mencerminkan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja di suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat TPT, semakin besar tantangan pembangunan dalam menyediakan kesempatan kerja yang layak.

Ada 4 jenis pengangguran terbuka menurut Todaro dan Smith (2015) dan Sukirno (2016) diantaranya:

1. **Pengangguran Friksional:** Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi sementara waktu ketika seseorang berada dalam proses transisi dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain atau ketika lulusan baru memasuki pasar kerja dan masih mencari pekerjaan yang sesuai. Todaro dan Smith (2015) menyebutkan bahwa jenis pengangguran ini merupakan bagian alami dari dinamika pasar tenaga kerja, karena selalu ada individu yang berpindah kerja atau mencari pekerjaan baru.
2. **Pengangguran Struktural:** Adalah Pengangguran struktural timbul akibat adanya ketidaksesuaian keterampilan yang dimiliki tenaga kerja dengan kebutuhan yang ada di pasar kerja. Hal ini sering terjadi karena perubahan teknologi, pergeseran struktur ekonomi, atau modernisasi industri. Menurut Todaro dan Smith (2015), pengangguran struktural menjadi masalah serius di negara berkembang karena tenaga kerja yang tersedia sering kali tidak memiliki kualifikasi sesuai dengan lapangan kerja baru yang tercipta.

3. Pengangguran Siklis: Pengangguran siklis (*cyclical unemployment*) terjadi karena adanya penurunan permintaan tenaga kerja yang disebabkan oleh fluktuasi dalam siklus ekonomi. Saat terjadi resesi, produksi menurun, sehingga perusahaan mengurangi jumlah tenaga kerja. Sebaliknya, ketika ekonomi pulih, permintaan tenaga kerja kembali meningkat. Todaro dan Smith (2015) menekankan bahwa jenis pengangguran ini erat kaitannya dengan stabilitas ekonomi makro suatu negara.
4. Pengangguran Musiman: Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi pada sektor-sektor tertentu yang kegiatan kerjanya dipengaruhi oleh musim atau periode tertentu. Misalnya, buruh tani yang hanya bekerja pada masa tanam dan panen, atau pekerja sektor pariwisata yang hanya terserap pada musim liburan. Pengangguran musiman umum terjadi di negara berkembang yang masih memiliki ketergantungan besar terhadap sektor pertanian dan pekerjaan informal berbasis waktu tertentu (Sukirno, 2016).

#### **2.6.1.2. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tidak hanya menggambarkan persentase pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, tetapi juga memiliki sejumlah indikator turunan yang dapat digunakan untuk memahami kondisi ketenagakerjaan secara lebih komprehensif. Indikator-indikator tersebut mencakup ukuran mengenai jumlah pengangguran, jumlah angkatan kerja, serta hubungan antara pekerja dan pengangguran terhadap penduduk usia kerja. Selain itu, analisis TPT juga dapat diperluas berdasarkan karakteristik demografis tertentu, seperti usia, pendidikan, jenis kelamin, dan wilayah tempat tinggal. Dengan adanya indikator-indikator ini, TPT tidak hanya berfungsi sebagai angka statistik semata, tetapi juga sebagai alat analisis yang membantu pemerintah dan peneliti dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan (Sukirno, 2016)

1. Jumlah Pengangguran: adalah Jumlah pengangguran adalah penduduk usia kerja yang tidak sedang bekerja namun secara aktif mencari pekerjaan. Mereka termasuk dalam kategori angkatan kerja, karena masih memiliki keinginan dan usaha untuk memperoleh pekerjaan, meskipun belum terserap dalam kegiatan ekonomi produktif (BPS, 2023b).

2. Jumlah Angkatan Kerja: Angkatan kerja mencakup seluruh penduduk usia kerja yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Dengan demikian, jumlah angkatan kerja menjadi komponen penting dalam menghitung TPT karena menunjukkan total tenaga kerja yang tersedia di pasar kerja (BPS, 2023b).

Rumus TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

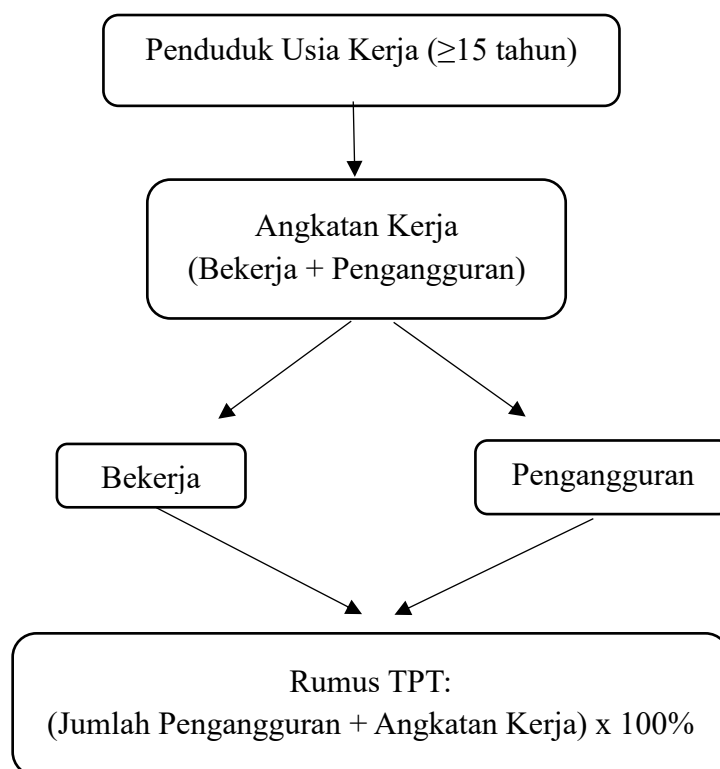
$$TPT = (Jumlah\ Penganggur) / (Jumlah\ Angkatan\ Kerja) \times 100\%$$

Rumus ini menggambarkan proporsi pengangguran terhadap total Angkatan kerja. Semakin besar hasil perhitungan TPT, semakin tinggi proporsi penduduk usia kerja yang tidak terserap dalam lapangan (BPS, 2023b).

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK): TPAK merupakan persentase penduduk usia kerja yang berpartisipasi aktif di pasar tenaga kerja, baik mereka yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. TPAK yang tinggi dapat menunjukkan ketersediaan tenaga kerja yang besar. Namun, apabila peningkatan TPAK tidak diiringi dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan yang memadai, maka hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya TPT (BPS, 2023d).
4. Rasio Pekerja terhadap Angkatan Kerja: Indikator ini menunjukkan seberapa besar proporsi angkatan kerja yang benar-benar terserap dalam lapangan pekerjaan. Apabila rasio pekerja terhadap angkatan kerja rendah, hal itu berarti semakin banyak tenaga kerja yang tidak bekerja, sehingga tingkat pengangguran terbuka cenderung meningkat (Todaro & Smith, 2015)
5. Rasio Penganggur terhadap Penduduk Usia Kerja (PUK): Rasio ini memperlihatkan perbandingan jumlah penganggur terhadap keseluruhan penduduk usia kerja, bukan hanya terhadap angkatan kerja. Dengan demikian, indikator ini memberi gambaran lebih luas tentang beban pengangguran dalam populasi usia kerja di suatu wilayah. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar tantangan dalam penyediaan lapangan pekerjaan (Sukirno, 2016).
6. TPT Menurut Karakteristik Demografis: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat dianalisis berdasarkan karakteristik demografis. Berdasarkan usia, TPT cenderung lebih tinggi pada kelompok usia muda (15–24 tahun) karena masih

dalam tahap memasuki pasar kerja. Berdasarkan tingkat pendidikan, lulusan menengah atas (SMA/SMK) umumnya menghadapi TPT yang lebih tinggi dibandingkan lulusan pendidikan rendah, yang mencerminkan ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, terdapat perbedaan TPT berdasarkan jenis kelamin dan wilayah tempat tinggal. TPT di wilayah perkotaan cenderung lebih tinggi seiring dengan besarnya jumlah pencari kerja dan keterbatasan lapangan kerja yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengangguran terbuka merupakan salah satu faktor yang berperan dalam memengaruhi tingkat kemiskinan melalui keterbatasan kesempatan memperoleh pendapatan (BPS, 2023d).

### 2.6.1.3 Perhitungan Tingkat Pengangguran Terbuka



Sumber: BPS (2024)

### Gambar 2. 2. Perhitungan Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dihitung dengan menggunakan data dari penduduk usia kerja, yaitu mereka yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia

kerja selanjutnya diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri atas penduduk yang bekerja dan mereka yang termasuk dalam kategori pengangguran, sedangkan bukan angkatan kerja mencakup pelajar, ibu rumah tangga, serta individu yang tidak mencari pekerjaan. Selanjutnya, TPT diperoleh dengan membandingkan jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja secara keseluruhan, lalu dikalikan 100 persen. Dengan demikian, TPT memberikan gambaran mengenai proporsi pengangguran di dalam angkatan kerja, sehingga menjadi salah satu indikator penting untuk menilai kondisi pasar tenaga kerja dan efektivitas pembangunan ekonomi suatu wilayah. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan kondisi pasar tenaga kerja, khususnya untuk mengetahui seberapa besar proporsi angkatan kerja yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperoleh pekerjaan. “Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja”. (BPS, 2023d)

Dengan Rumus TPT:

$$TPT = \frac{(\text{Jumlah Pengangguran})}{(\text{Jumlah Angkatan Kerja})} \times 100\%$$

Keterangan:

Jumlah Pengangguran: individu yang belum bekerja namun sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan kegiatan usaha, atau tidak melakukan pencarian kerja karena merasa tidak memiliki peluang untuk memperoleh pekerjaan.

Jumlah Angkatan Kerja: penduduk usia kerja ( $\geq 15$  tahun) yang bekerja + pengangguran.

## 2.2. Kajian Empiris

**Tabel 2.1. Penelitian – Penelitian Empiris yang Relevan**

No	Judul, Penulis, Tahun	Metode Analisis dan Variabel	Kesimpulan
1	Pengaruh Produktivitas Pertanian terhadap Tingkat Kemiskinan	<i>Two Stage Least Square (TSLS)</i>  <b>Variabel Terikat:</b> Tingkat Kemiskinan	Hasil menunjukkan bahwa produktivitas pertanian tidak berpengaruh signifikan dalam menurunkan kemiskinan. Namun sebaliknya, kemiskinan justru berpengaruh terhadap

No	Judul, Penulis, Tahun	Metode Analisis dan Variabel	Kesimpulan
	di Indonesia 2015-2020 (Farida & Widodo, 2024)	<b>Variabel Bebas:</b> 1. Produktivitas Pertanian 2. belanja pemerintah,	produktivitas, menunjukkan adanya kondisi dimana masyarakat miskin bekerja keras dalam sektor pertanian sebagai bentuk survival.
2	Analisis Kemiskinan dan Pertumbuhan Sektor Pertanian di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia (Harahap et al., 2022)	<i>Two Stage Least Squares</i> <b>Variabel Terikat:</b> 1. Kemiskinan 2. PDRB sektor pertanian. <b>Variabel Bebas:</b> 1. Impor Sektor Pertanian 2. Investasi Sektor Pertanian 3. Luas Lahan Sektor Pertanian, 4. Ekspor Sektor Pertanian 5. Indeks Pembangunan Manusia	Pertumbuhan sektor pertanian berperan besar dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Sumatera Utara. Investasi dan perluasan lahan turut mendorong peningkatan kontribusi sektor ini terhadap PDRB dan ketahanan ekonomi masyarakat miskin.
3	Kontribusi Hasil Produksi Sektor Pertanian, Kehutanan & Perikanan Dan Ipm Dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan Di Sumatera Selatan (Fujiansyah et al., 2022)	Regresi data panel <b>Variabel Terikat:</b> 1. Tingkat Kemiskinan <b>Variabel Bebas:</b> 1. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertanian dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara signifikan menurunkan angka kemiskinan di wilayah Sumatera Selatan. IPM memainkan peran penting dalam memediasi akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

No	Judul, Penulis, Tahun	Metode Analisis dan Variabel	Kesimpulan
4	Pemodelan Data Kemiskinan di Pulau Sumatera dengan Regresi Multilevel Spline Linear Truncated (Davala et al., 2024)	<p>Regresi multilevel dengan spline linier truncated</p> <p><b>Variabel Terikat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penduduk Miskin</li> </ol> <p><b>Variabel Bebas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat Pengangguran Terbuka</li> <li>2. Indeks Pembangunan Manusia</li> <li>3. Laju Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>4. Laju Pertumbuhan Penduduk</li> </ol>	Berdasarkan hasil dan pembahasan, diperoleh bahwa faktor yang berpengaruh terhadap PPM di Pulau Sumatera tahun 2021 pada level-1 atau level kabupaten/kota adalah PPK dan pada level-2 atau level provinsi adalah LPP dan LPE. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap PPM di Pulau Sumatera tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih mendalam mengenai kondisi sosio-ekonomi di Pulau Sumatera.
5	Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian, Produksi dan Kemiskinan Pedesaan di Indonesia (Kharisma, 2020)	<p><i>Two Stage Least Square.</i></p> <p><b>Variabel Terikat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengeluaran Pemerintah</li> <li>2. Kemiskinan Perdesaan</li> </ol> <p>Variabel Bebas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produksi Petani</li> <li>2. Nilai Tukar Petani</li> <li>3. Kualitas jalan</li> <li>4. Pupuk Subsidi</li> <li>5. Alat dan Mesin Pertanian</li> </ol>	Hasil menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap peningkatan produksi pertanian. Namun, hanya produktivitas dan indikator pendapatan petani yang berpengaruh langsung terhadap penurunan kemiskinan, bukan pengeluaran itu sendiri.
6	Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Pada Sektor Pertanian Di	<p><i>Fixed Effect Model</i></p> <p><b>Variabel Terikat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemiskinan</li> </ol> <p><b>Variabel Bebas:</b></p>	Ditemukan bahwa peningkatan PDRB sektor pertanian dan pengangguran justru menaikkan angka kemiskinan, sedangkan peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) dan pendidikan dapat menurunkannya. Ini

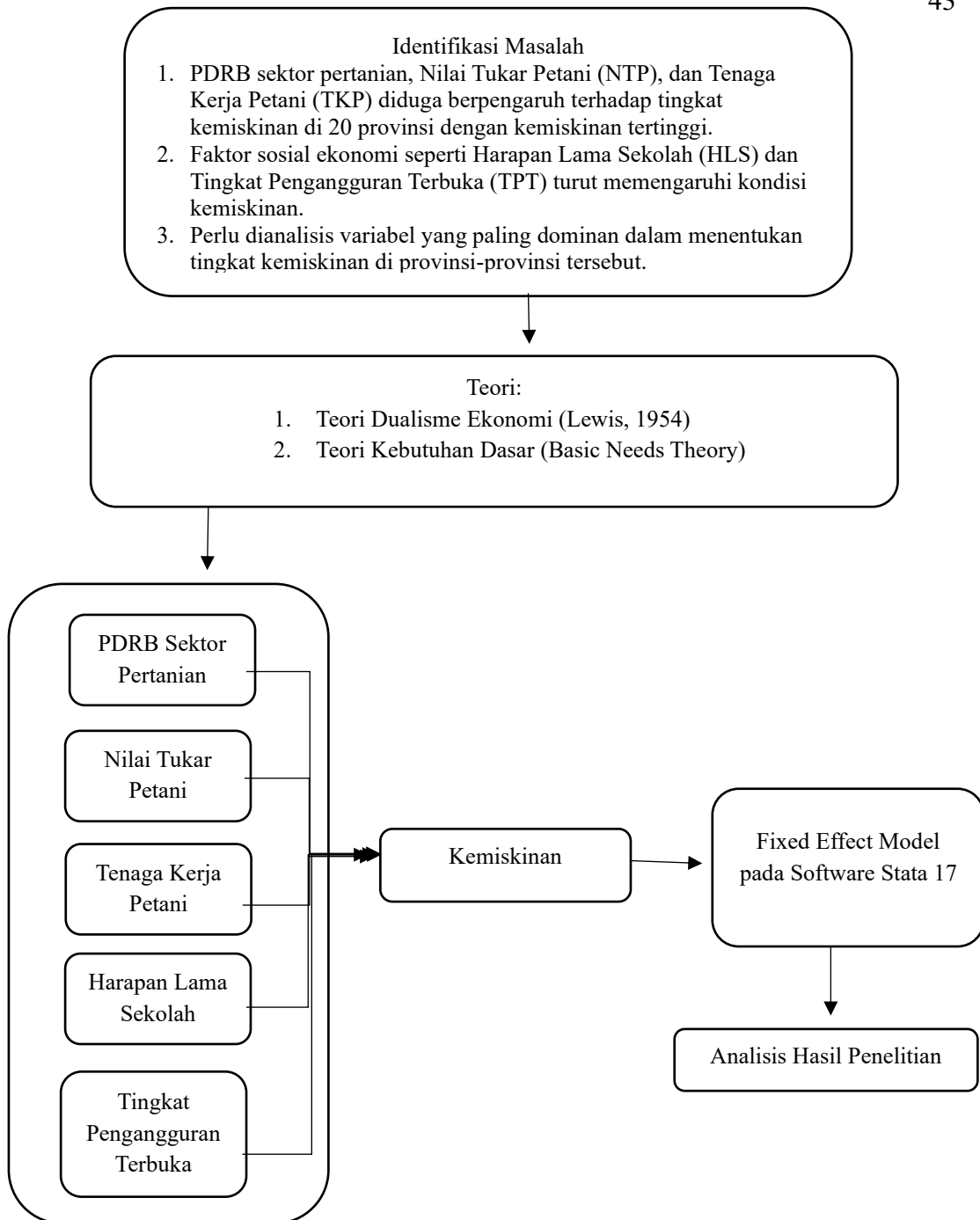
No	Judul, Penulis, Tahun	Metode Analisis dan Variabel	Kesimpulan
	Indonesia Bagian Barat (Safira Maulidina, Vadilla Mutia Zahara, 2022)	1. PDRB Sektor Pertanian 2. Nilai Tukar Petani 3. Tenaga Kerja Sektor Pertanian 4. Pendidikan 5. Pengangguran	mengindikasikan pentingnya kualitas daripada sekadar kuantitas produksi.
7	Pengaruh Indikator Pertanian Terhadap Kemiskinan Jawa Tengah  (Triatmo, 2024)	Deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.  <b>Variabel Terikat:</b> 1. Penduduk Miskin  <b>Variabel Bebas:</b> 1. Nilai Tukar Petani 2. Pekerja Pertanian 3. PDRB Pertanian	Hasil riset ini menunjukkan terdapat pengaruh NTP terhadap kemiskinan sedangkan pekerja pertanian dan PDRB Pertanian tidak memiliki pengaruh terhadap persentase kemiskinan.
58	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan  (Priseptian & Primandhana, 2022)	<i>Ordinary Least Square (OLS)</i> .  <b>Variabel Terikat:</b> 1. Kemiskinan  <b>Variabel Bebas:</b> 1. Upah Minimum Provinsi 2. Indeks Pembangunan Manusia 3. Pertumbuhan Ekonomi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, Pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, dan secara simultan seluruh variabel bebas mempengaruhi kemiskinan di Jawa Timur.
9	Does industry convergence between agri culture and related sectors	<i>Two-Way Fixed Effect System GMM (SYS-GMM)</i>  Variabel Terikat:	Penelitian ini menemukan bahwa konvergensi industri pedesaan, seperti integrasi pertanian dengan pariwisata, pengolahan, peternakan, dan internet, berpengaruh signifikan dalam

No	Judul, Penulis, Tahun	Metode Analisis dan Variabel	Kesimpulan
	alleviate rural poverty: evidence from China  (Yang et al., 2023)	1. Tingkat kemiskinan Perdesaan  Variabel Bebas: 1. Konvergensi pertanian dan pariwisata 2. Konvergensi pertanian dan industri pengolahan 3. Konvergensi pertanian dan peternakan 4. Konvergensi pertanian dan internet	menurunkan kemiskinan. Mekanismenya terjadi melalui peningkatan wirausaha ( <i>self-employment</i> ) dan penyerapan tenaga kerja pedesaan. Faktor pendukung seperti investasi, pendidikan, pengeluaran pemerintah, dan keuangan pedesaan juga memperkuat pengaruh tersebut. Hasil uji ketahanan dengan SYS-GMM menunjukkan konsistensi, sehingga dapat disimpulkan bahwa konvergensi industri merupakan strategi penting dalam pengentasan kemiskinan pedesaan.
10	Paths out of poverty: International experience  (FAN & CHO, 2021)	<i>Dynamic System GMM (Generalized Method of Moments)</i>  Variabel Terikat: 1. Kemiskinan  Variabel Bebas: 1. Urbanization (URB) 2. GDP per capita (PGDP) 3. Industrial structure (IS) 4. Education (EDU) 5. Government expenditure (GOV) 6. Financial development (FIN) 7. Infrastructure (INFRA)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa urbanisasi berperan signifikan dalam menurunkan kemiskinan pedesaan di China. Dampaknya lebih kuat di wilayah maju, sementara di daerah tertinggal relatif lemah. Faktor kontrol seperti pendapatan per kapita, struktur industri, pendidikan, pengeluaran pemerintah, keuangan, dan infrastruktur turut mendukung pengurangan kemiskinan. Penelitian juga menemukan adanya efek spasial, di mana urbanisasi di satu provinsi dapat menekan kemiskinan di wilayah tetangga. Temuan ini konsisten pada berbagai model, termasuk System GMM dan model spasial, sehingga urbanisasi disimpulkan sebagai faktor kunci pengentasan kemiskinan.

### 2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berangkat dari permasalahan mengenai kemiskinan di wilayah pedesaan yang masih menjadi isu sentral dalam pembangunan ekonomi. Beberapa faktor ekonomi dan sosial diduga berpengaruh terhadap kondisi kemiskinan, di antaranya PDRB sektor pertanian, Nilai Tukar Petani (NTP), serta penyerapan Tenaga Kerja Pertanian (TKP). Selain itu, aspek sosial berupa Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga dipertimbangkan karena dapat memengaruhi kualitas sumber daya manusia serta tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang berperan signifikan dan variabel mana yang paling dominan dalam menentukan tingkat kemiskinan.

Landasan teori yang digunakan meliputi Teori Dualisme Ekonomi dari (W. A. Lewis, 1954) yang menekankan perbedaan produktivitas antara sektor pertanian dan non-pertanian, serta Teori Kebutuhan Dasar (*Basic Needs Theory*) yang menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan pokok sebagai dasar peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kedua teori ini digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi, struktur tenaga kerja, kualitas pendidikan, dan kondisi kemiskinan.



**Gambar 2. 3. Kerangka Pemikiran**

#### **2.4. Rumusan Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diduga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.
2. Nilai Tukar Petani (NTP) diduga berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.
3. Tenaga Kerja Petani (TKP) diduga berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.
4. Harapan Lama Sekolah (HLS) diduga berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diduga berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.

### III. METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian asosiatif kausal. Pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada paradigma positivistik, dengan karakteristik utama berupa pengukuran variabel dalam bentuk angka serta pengujian hipotesis melalui analisis statistik (Sugiyono, 2020). Penelitian asosiatif kausal bertujuan untuk menganalisis hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Data yang digunakan bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya dalam publikasi *Profil Kemiskinan di Indonesia* dan publikasi statistik terkait lainnya. Pemilihan BPS sebagai sumber data didasarkan pada pertimbangan bahwa lembaga tersebut merupakan institusi resmi pemerintah yang memiliki standar metodologi statistik yang terstruktur, sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat akurasi dan konsistensi yang tinggi. Unit analisis dalam penelitian ini adalah 20 provinsi di Indonesia dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi. Pemilihan sampel dilakukan berdasarkan persentase penduduk miskin tahun 2024, yang merupakan tahun terakhir dalam periode observasi penelitian. Tahun 2024 dipilih karena mencerminkan kondisi kemiskinan terkini. Pada tahun tersebut, tingkat kemiskinan nasional berada pada kisaran sekitar 8–10 persen, sementara provinsi-provinsi yang termasuk dalam sampel penelitian memiliki tingkat kemiskinan di atas atau mendekati kisaran tersebut, sehingga relatif berada di atas rata-rata nasional.

Pemilihan provinsi berdasarkan tahun terakhir bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian ini berfokus pada wilayah yang hingga akhir periode penelitian masih menghadapi tingkat kemiskinan yang tinggi. Meskipun penentuan sampel didasarkan pada kondisi tahun 2024, provinsi-provinsi tersebut secara umum juga

menunjukkan kecenderungan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dalam beberapa tahun sebelumnya selama periode 2015–2024, sehingga tidak bersifat temporer. Dengan demikian, kemiskinan di wilayah tersebut dapat dikategorikan sebagai permasalahan yang bersifat struktural. Selain pertimbangan empiris, pembatasan sampel pada 20 provinsi juga didasarkan pada pertimbangan metodologis. Dalam analisis data panel, diperlukan jumlah unit cross-section yang memadai agar estimasi model dapat dilakukan secara lebih efisien serta mampu menangkap variasi antarwilayah dalam periode waktu tertentu. Dengan memfokuskan penelitian pada provinsi dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi, heterogenitas ekstrem antara wilayah miskin dan wilayah sangat maju dapat diminimalkan, sehingga estimasi model menjadi lebih stabil dan relevan untuk menjelaskan dinamika kemiskinan pada kelompok wilayah prioritas.

Dalam penelitian ini, analisis dilakukan menggunakan pendekatan regresi data panel dengan metode Fixed Effect Model (FEM). Metode ini digunakan untuk mengakomodasi adanya perbedaan karakteristik yang tidak teramati (unobserved heterogeneity) antarprovinsi yang bersifat tetap sepanjang waktu. Melalui pendekatan Fixed Effect Model, setiap unit cross-section atau provinsi diasumsikan memiliki karakteristik khusus yang dapat memengaruhi tingkat kemiskinan, namun tidak dapat diobservasi secara langsung dalam model. Dengan demikian, model ini mampu mengendalikan perbedaan karakteristik antarwilayah sehingga estimasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dapat diperoleh secara lebih akurat. Secara geografis, sebagian besar provinsi dalam sampel penelitian ini berasal dari Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi, dengan beberapa provinsi lainnya berada di kawasan Indonesia bagian timur. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi wilayah dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi tidak hanya terpusat pada satu kawasan, melainkan tersebar di beberapa wilayah dengan karakteristik ekonomi yang berbeda. Kondisi tersebut mencerminkan masih adanya ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia.

**Tabel 3.1. Variabel, Simbol, Satuan dan Sumber Data**

Variabel	Simbol	Satuan	Sumber Data
Kemiskinan	P	Persen	Badan Pusat Statistik
Produk Domestik Bruto sektor Pertanian	PDRB	Miliar Rupiah	Badan Pusat Statistik
Nilai Tukar Petani	NTP	Persen	Badan Pusat Statistik
Tenaga Kerja Petani	TKP	Persen	Badan Pusat Statistik
Harapan Lama Sekolah	HLS	Tahun	Badan Pusat Statistik
Tingkat Pengangguran Terbuka	TPT	Persen	Badan Pusat Statistik

Data Penunjang pada penelitian ini didapatkan dari library study atau studi kepustakaan melalui cara pengumpulan data literatur yang telah ada mengenai kajian penelitian yang telah ada, teori teori yang mendukung, serta literasi lain yang mendukung penelitian. Literatur yang telah di kumpulkan kemudia di kaji oleh peneliti untuk menguatkan hasil penelitian ini, sehingga hasil yang diperoleh dapat sama dengan kenyataan yang sebenarnya

### 3.2. Definisi Operasional Variabel

Untuk menghindari dan meminimalisir kesalahan penafsiran, maka peneliti menjabarkan definisi operasional dari variabel sebagai berikut:

#### 3.2.1 Kemiskinan (P)

Kemiskinan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kondisi ketika penduduk tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak. Secara operasional, indikator yang digunakan adalah persentase penduduk miskin, yaitu proporsi penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita bulanan di bawah batas garis kemiskinan yang ditetapkan. Garis kemiskinan ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui pendekatan Cost of Basic Needs (CBN), yang memperhitungkan kebutuhan minimum makanan setara 2.100 kilokalori per kapita per hari serta kebutuhan non-makanan seperti perumahan, pendidikan, dan

kesehatan. Dengan demikian, seseorang digolongkan sebagai penduduk miskin apabila tidak mampu memenuhi standar kebutuhan minimum tersebut.

Data kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kemiskinan umum yang mencakup seluruh penduduk tanpa membedakan wilayah tempat tinggal, baik perkotaan maupun non-perkotaan. Data diperoleh dari publikasi resmi BPS yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan disajikan dalam satuan persen (%). Variabel kemiskinan digunakan sebagai variabel dependen utama dalam penelitian ini karena mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan data kemiskinan pada periode 2015–2024 untuk menganalisis dinamika kemiskinan antarprovinsi di Indonesia.

### **3.2.2 Produk Domestik Bruto Sektor Pertanian (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto sektor pertanian atas dasar harga konstan dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai nilai tambah bruto yang dihasilkan dari seluruh aktivitas ekonomi di sektor pertanian dengan menggunakan harga konstan pada tahun dasar tertentu. Penggunaan harga konstan bertujuan untuk menghilangkan pengaruh inflasi sehingga mencerminkan pertumbuhan riil sektor pertanian dari waktu ke waktu. Data variabel ini diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dan disajikan dalam satuan miliar rupiah. Produk Domestik Bruto yang diteliti memiliki lingkup 20 provinsi di Indonesia dengan tahun yang diteliti pada tahun 2015 sampai 2024

### **3.2.3 Nilai Tukar Petani (NTP)**

Nilai Tukar Petani (NTP) dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai indikator kesejahteraan relatif petani yang diperoleh dari perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP menggambarkan kemampuan petani dalam menutupi kebutuhan hidupnya dari hasil usahanya di sektor pertanian. Jika NTP lebih dari 100 persen, berarti petani mengalami surplus karena harga produk pertanian yang diterima lebih tinggi

dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Sebaliknya, apabila NTP kurang dari 100 persen, menunjukkan penurunan daya beli petani. Data NTP diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan dinyatakan dalam persen (%). Variabel ini digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. Nialai Tukar Petani yang diteliti dengan lingkup 20 provinsi di Indonesia dengan tahun 2015 sampai dengan tahun 2024

### **3.2.4 Tenaga Kerja Petani (TKP)**

Tenaga Kerja Petani dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian, yang mencakup subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Indikator ini mencerminkan besarnya penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian serta tingkat ketergantungan sebagian masyarakat terhadap aktivitas pertanian sebagai sumber utama pendapatan. Tingginya proporsi tenaga kerja di sektor pertanian menunjukkan karakteristik sektor dengan produktivitas yang relatif rendah, sehingga berpotensi berkaitan dengan tingkat kemiskinan. Data Tenaga Kerja Petani diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui publikasi ketenagakerjaan atau hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan dinyatakan dalam satuan jiwa (orang) atau persentase (%). Variabel Tenaga Kerja Petani digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di sektor pertanian dan keterkaitannya dengan kemiskinan pada 20 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia selama periode 2015–2024.

### **3.2.5 Harapan Lama Sekolah (HLS)**

Harapan Lama Sekolah dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai rata-rata jumlah tahun pendidikan yang diperkirakan dapat ditempuh oleh seorang anak pada usia tertentu, dengan asumsi anak tersebut mengikuti jenjang pendidikan sesuai kondisi yang berlaku saat ini. Indikator ini mencerminkan akses dan peluang pendidikan masyarakat di suatu daerah, sehingga semakin tinggi nilai harapan lama sekolah menunjukkan semakin baiknya kesempatan memperoleh pendidikan formal. Data harapan lama sekolah diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) melalui hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan

disajikan dalam satuan tahun. Harapan Lama Sekolah yang diteliti dengan lingkup 20 provinsi di Indonesia dengan tahun 2015 sampai dengan tahun 2024

### **3.2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Dalam penelitian ini, Tingkat Pengangguran Terbuka diukur sebagai persentase angkatan kerja yang belum bekerja tetapi sedang aktif mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha terhadap keseluruhan angkatan kerja. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan kondisi pasar tenaga kerja dan menjadi ukuran utama dalam menilai ketersediaan lapangan kerja di suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka menunjukkan semakin besar jumlah tenaga kerja yang belum terserap dalam kegiatan ekonomi produktif. Data tingkat pengangguran terbuka diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan dinyatakan dalam persen (%). Tingkat Pengangguran Terbuka yang diteliti dengan lingkup 20 provinsi di Indonesia dengan tahun 2015 sampai dengan tahun 2024

### **3.3. Metode Analisis**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi, yaitu suatu teknik statistik yang bertujuan untuk melihat keterkaitan antara dua atau lebih variabel. Analisis regresi berfokus pada hubungan antara variabel dependen variabel yang dipengaruhi dengan variabel independen variabel yang memengaruhi. Melalui analisis ini dapat diketahui arah serta besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila variabel independen yang digunakan lebih dari satu, maka metode yang dipakai disebut regresi linier berganda. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan regresi data panel karena data yang dianalisis merupakan gabungan antara data time series dan cross section, yaitu 20 provinsi selama periode pengamatan tertentu. Pendekatan data panel dinilai lebih unggul dibandingkan data cross section atau time series murni karena mampu mengakomodasi heterogenitas antarwilayah serta meningkatkan jumlah observasi sehingga estimasi menjadi lebih efisien.

Sebelum dilakukan estimasi model regresi data panel, data terlebih dahulu melalui tahap pengolahan untuk menjaga kualitas dan stabilitas estimasi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan metode winsorizing untuk mengurangi pengaruh nilai ekstrem (outlier) yang berpotensi mendistorsi hasil estimasi. Winsorizing dilakukan dengan membatasi nilai pada persentil tertentu sehingga observasi yang terlalu ekstrem tidak dihilangkan, melainkan disesuaikan ke batas persentil yang ditentukan. Teknik ini digunakan karena data panel antarprovinsi memiliki variasi yang cukup tinggi, sehingga kemungkinan terdapat perbedaan ekstrem antarwilayah.

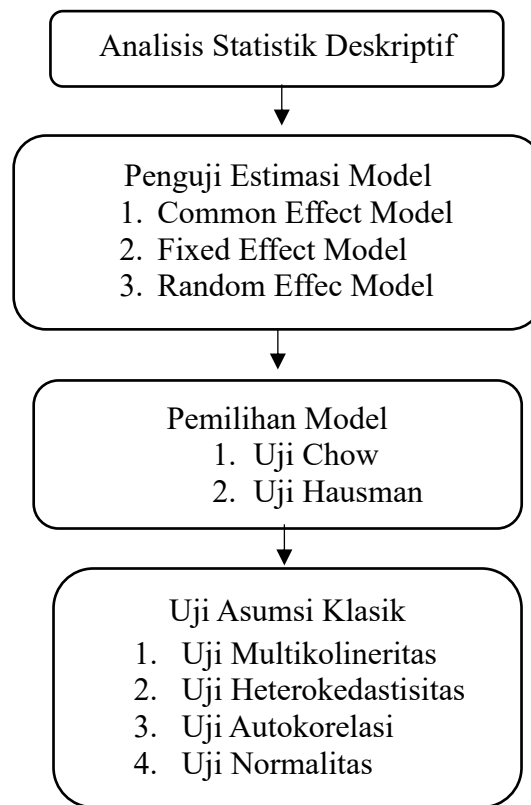
Pada tahap awal, estimasi dilakukan menggunakan model panel statis yang meliputi Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Ketiga model tersebut digunakan untuk mengidentifikasi pendekatan estimasi yang paling sesuai dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini. Common Effect Model merupakan pendekatan paling sederhana dalam regresi data panel yang mengasumsikan bahwa seluruh unit cross section memiliki karakteristik yang sama sehingga tidak terdapat perbedaan khusus antarunit pengamatan. Dalam model ini, data panel diperlakukan seperti data gabungan (pooled data) tanpa mempertimbangkan adanya efek individu.

Sementara itu, Fixed Effect Model (FEM) digunakan untuk mengakomodasi adanya perbedaan karakteristik yang tidak teramati (unobserved heterogeneity) antarunit cross section yang bersifat tetap sepanjang waktu. Model ini mengasumsikan bahwa setiap provinsi memiliki karakteristik khusus yang dapat memengaruhi variabel dependen, namun karakteristik tersebut tidak dapat diukur secara langsung dalam model. Dengan menggunakan pendekatan fixed effect, perbedaan karakteristik antarprovinsi dapat dikontrol melalui penggunaan variabel dummy atau transformasi within estimator sehingga estimasi koefisien menjadi lebih akurat. Adapun Random Effect Model (REM) merupakan pendekatan yang mengasumsikan bahwa perbedaan karakteristik antarunit cross section bersifat acak dan tidak berkorelasi dengan variabel independen dalam model. Model ini

menggunakan pendekatan Generalized Least Square (GLS) untuk menghasilkan estimasi yang lebih efisien apabila asumsi random effect terpenuhi.

Setelah ketiga model tersebut diestimasi, langkah selanjutnya adalah menentukan model yang paling sesuai melalui beberapa pengujian pemilihan model, yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier. Uji Chow digunakan untuk menentukan apakah model yang lebih tepat adalah Common Effect Model atau Fixed Effect Model. Uji Hausman digunakan untuk menentukan apakah model yang lebih sesuai adalah Fixed Effect Model atau Random Effect Model. Sementara itu, uji Lagrange Multiplier digunakan untuk membandingkan antara Common Effect Model dan Random Effect Model. Model yang terpilih dari hasil pengujian tersebut selanjutnya digunakan sebagai model utama dalam analisis untuk menjelaskan pengaruh variabel Produk Domestik Regional Bruto sektor pertanian (PDRB), Nilai Tukar Petani (NTP), Tenaga Kerja Petani (TKP), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap tingkat kemiskinan pada 20 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia selama periode 2015–2024.

Berikut ialah bentuk kerangka metodologi yang digunakan pada penelitian ini:



Sumber: Diolah Penulis (2025) Dari Berbagai Literatur

### **Gambar 3. 1. Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini diolah menggunakan perangkat lunak Stata 17 dengan tujuan untuk mengetahui secara lebih rinci sejauh mana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Metode yang digunakan adalah regresi berganda dengan pendekatan regresi data panel. Pemilihan metode ini didasarkan pada kemampuannya dalam menggabungkan data cross section dan time series, sehingga dapat memberikan jumlah observasi yang lebih besar serta menghasilkan estimasi yang lebih efisien.

Persamaan regresi yang dianalisis dalam penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut:

$$P = f(PDRB, NTP, TKP, HLS, TPT)$$

Model penelitian ini selanjutnya diturunkan ke dalam bentuk persamaan berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 NTP_{it} + \beta_3 TKP_{it} + \beta_4 HLS_{it} + \beta_5 TPT_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

Y = Kemiskinan (%)

PDRB = Produk Domestik Bruto sektor Pertanian

NTP = Nilai Tukar Petani

TKP = Tenaga Kerja Petani

HLS = Harapan Lama Sekolah

TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka

$\beta_0$  = Konstanta (*intercept*)

$\beta_1 - \beta_5$  = Koefisien regresi variabel bebas

$e$  = *error term*

$i = 1, 2, \dots, n$ , menunjukkan provinsi – provinsi di Indonesia (*cross-section*)

$t = 1, 2, \dots, t$ , menjelaskan tahun – tahun yang diteliti (*time series*)

Secara konseptual, model ini dapat menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh Produk Domestik Bruto pada sektor pertanian (PDRB), Nilai Tukar Petani (NTP), Tenaga Kerja Petani (TKP), Harapan Lama Sekolah (HLS), serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Sebagian variabel ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural (ln) untuk mengurangi heterogenitas varians dan mempermudah interpretasi koefisien regresi. Dengan demikian, model regresi linier yang diterapkan diharapkan mampu memberikan gambaran yang sesuai dengan kondisi empiris yang sebenarnya. Hasil estimasi yang diperoleh diharapkan dapat mencerminkan hubungan antarvariabel penelitian secara objektif dan akurat.

Gujarati dan Porter (2009) menjelaskan bahwa model regresi linier berganda secara umum dituliskan sebagai:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \dots + \beta_k X_{ki} + u_i$$

Dengan demikian, model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model linier yang dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$P_{it} = \beta_0 + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 NTP_{it} + \beta_3 TKP_{it} + \beta_4 HLS_{it} + \beta_5 TPT_{it} + e_{it}$$

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel, yaitu metode yang menggabungkan data cross section dan time series dalam satu model estimasi. Penggunaan data panel memungkinkan peneliti untuk mengamati dinamika perubahan variabel antarprovinsi dari waktu ke waktu, sehingga mampu memberikan informasi yang lebih lengkap dibandingkan penggunaan data cross section atau time series secara terpisah. Analisis ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen, serta mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat

Dalam regresi data panel terdapat beberapa pendekatan estimasi yang umum digunakan, yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Fixed Effect Model digunakan untuk mengakomodasi adanya perbedaan karakteristik yang tidak teramati (unobserved heterogeneity) antarunit cross section yang bersifat tetap sepanjang waktu. Model ini mengasumsikan bahwa setiap provinsi memiliki karakteristik khusus yang dapat memengaruhi variabel dependen, namun karakteristik tersebut tidak dapat diukur secara langsung dalam model. Oleh karena itu, pendekatan fixed effect memungkinkan perbedaan karakteristik antarprovinsi dapat dikontrol sehingga estimasi koefisien regresi menjadi lebih akurat.

Menurut Baltagi (2005), model data panel memiliki beberapa keunggulan dibandingkan model regresi biasa karena mampu mengakomodasi heterogenitas individu, meningkatkan jumlah observasi, serta mengurangi potensi bias akibat variabel yang tidak teramati. Selain itu, penggunaan regresi data panel juga memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap dinamika hubungan antarvariabel dalam periode waktu tertentu.

Seluruh proses pengolahan dan estimasi model dalam penelitian ini dilakukan menggunakan perangkat lunak Stata 17 untuk menilai secara lebih rinci besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen serta memperoleh hasil estimasi yang lebih akurat dan sistematis.

### **3.3.1 Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menyajikan gambaran umum terkait karakteristik data dalam penelitian. Analisis ini meliputi nilai rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum, serta standar deviasi dari setiap variabel yang dianalisis. Melalui statistik deskriptif, dapat diketahui pola sebaran data, kecenderungan nilai variabel, serta tingkat variasi data antarprovinsi dan antarperiode penelitian. Hasil analisis ini menjadi dasar awal untuk memahami kondisi variabel sebelum dilakukan analisis lebih lanjut menggunakan berbagai uji

### **3.3.2 Estimasi Model**

Dalam penelitian ini digunakan metode regresi data panel untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Data panel merupakan kombinasi antara data time series dan cross section. Estimasi model data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM):

#### **1. Common Effect Model (CEM)**

Common Effect Model atau sering disebut sebagai Pooled Least Square (PLS) merupakan pendekatan paling sederhana dalam regresi data panel. Model ini mengasumsikan bahwa tidak terdapat perbedaan karakteristik antar individu (cross

section) maupun antar waktu (time series), sehingga menggunakan satu intercept yang sama untuk seluruh unit observasi.

Secara umum, model CEM dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

$Y_{it}$  adalah variabel dependen pada unit  $i$  dan waktu  $t$

$X_{it}$  adalah variabel independen

$\beta_0$  adalah intercept

$\varepsilon_{it}$  adalah error term

Model ini tidak mempertimbangkan adanya heterogenitas antar individu.

## 2. Fixed Effect Model (FEM)

Fixed Effect Model mengasumsikan bahwa terdapat perbedaan karakteristik antar individu (misalnya provinsi) yang dapat memengaruhi variabel dependen. Perbedaan tersebut ditangkap melalui perbedaan intercept pada masing-masing individu, sedangkan slope koefisien tetap sama.

Model FEM dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

$\alpha_i$  adalah intercept yang berbeda untuk setiap individu (cross section).

Pendekatan ini mampu mengontrol faktor-faktor yang tidak teramati (unobserved heterogeneity) yang bersifat tetap (time-invariant).

## 3. Random Effect Model (REM)

Random Effect Model mengasumsikan bahwa perbedaan karakteristik antar individu bersifat acak dan menjadi bagian dari komponen error. Model ini menggunakan pendekatan Generalized Least Square (GLS).

Model REM dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + \mu_i + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

$\mu_i$  adalah komponen error khusus individu (random error)

$\varepsilon_{it}$  adalah error idiosinkratik

### 3.3.3 Pemilihan Model

Pengujian spesifikasi model dilakukan untuk menentukan model data panel yang paling tepat digunakan dalam penelitian, apakah model Common Effect, Fixed Effect, atau Random Effect. Pengujian ini meliputi:

1. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menentukan apakah model Fixed Effect lebih tepat dibandingkan model Common Effect. Keputusan pengujian didasarkan pada nilai probabilitas ( $p$ -value). Jika nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi ( $\alpha = 0,05$ ), maka model Fixed Effect lebih sesuai digunakan dalam penelitian.

2. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih antara model Fixed Effect dan Random Effect. Apabila nilai probabilitas uji Hausman lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ , maka model Fixed Effect dinilai lebih tepat. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ , maka model Random Effect lebih sesuai digunakan.

3. Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier digunakan untuk menentukan apakah model Random Effect lebih tepat dibandingkan model Common Effect. Jika hasil uji menunjukkan nilai probabilitas lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ , maka model Random Effect lebih layak digunakan dibandingkan Common Effect.

### 3.3.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi asumsi BLUE (Best Linear Unbiased Estimator), sehingga hasil estimasi yang diperoleh bersifat tidak bias, efisien, dan konsisten. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang digunakan meliputi uji multikolinearitas, heterokedastisitas, autokorelasi, dan normalitas.

1. Uji Multikolineritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki korelasi yang tinggi antar variabel bebas, karena dapat menyebabkan ketidakstabilan koefisien regresi dan meningkatkan standar error. Menurut (N. & Gujarati, 2009), multikolinearitas dapat menyebabkan koefisien regresi menjadi tidak stabil serta menyulitkan interpretasi hasil estimasi. Oleh

karena itu, pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) atau korelasi antar variabel independen. Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: jika nilai VIF  $< 10$  maka tidak terjadi multikolinearitas, sedangkan jika nilai VIF  $> 10$  maka model mengalami multikolinearitas.

## 2. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians error (residual) pada setiap observasi. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya heterokedastisitas (homokedastisitas), yaitu varians residual yang konstan. Pengujian heterokedastisitas dapat dilakukan menggunakan Uji Glejser, Uji Breusch-Pagan, atau melihat probabilitas dari hasil uji statistik. Kriteria pengambilan keputusan adalah:

Jika nilai probabilitas (p-value)  $> \alpha$  (0,05), maka tidak terjadi heterokedastisitas.

Jika nilai probabilitas (p-value)  $< \alpha$  (0,05), maka terjadi heterokedastisitas.

## 3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara error pada suatu periode dengan error pada periode lainnya. Autokorelasi dapat menyebabkan estimasi koefisien regresi menjadi tidak efisien serta standar error menjadi tidak valid (N. & Gujarati, 2009), Dalam penelitian ini, pengujian autokorelasi dilakukan menggunakan uji Wooldridge pada data panel. Kriteria pengambilan keputusan adalah jika nilai probabilitas (p-value) lebih besar dari tingkat signifikansi ( $\alpha = 0,05$ ), maka model dinyatakan tidak mengalami autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka model mengalami autokorelasi.

Hipotesis nol ( $H_0$ ): Tidak terdapat autokorelasi.

Hipotesis alternatif ( $H_1$ ): Terdapat autokorelasi.

## 4. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi residual dalam model regresi berdistribusi normal. Normalitas residual penting terutama untuk keperluan

pengujian hipotesis (uji t dan uji F). Pengujian normalitas dapat dilakukan menggunakan Uji Jarque-Bera atau melihat nilai probabilitasnya. Kriteria pengambilan keputusan adalah:

Jika nilai probabilitas ( $p\text{-value}$ )  $> \alpha$  (0,05), maka residual berdistribusi normal.

Jika nilai probabilitas ( $p\text{-value}$ )  $< \alpha$  (0,05), maka residual tidak berdistribusi normal.

### 3.3.5 Uji Hipotesis

#### 1. Uji t

Uji parsial atau uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen dalam model penelitian. Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah setiap variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat ketika variabel lain dalam model dianggap konstan. Menurut Gujarati dan Porter (2009), uji t dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas ( $p\text{-value}$ ) dari masing-masing koefisien variabel independen dengan tingkat signifikansi yang telah ditetapkan. Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi ( $\alpha = 0,05$ ), maka variabel independen tersebut dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi, maka variabel independen tersebut dinyatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Lebih lanjut, Wooldridge (2010) menjelaskan bahwa dalam model regresi data panel, uji t digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial terhadap setiap koefisien variabel independen dalam model. Melalui pengujian ini dapat diketahui variabel mana yang secara individual memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Dengan demikian, uji parsial menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan mengenai hubungan antara variabel independen dan variabel dependen secara individual.

## 2. Uji F

Uji simultan atau uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen dalam model regresi secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian ini bertujuan untuk menilai apakah model penelitian secara keseluruhan mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen. Menurut Gujarati dan Porter (2009), uji F dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas (*p-value*) dari statistik F dengan tingkat signifikansi yang telah ditetapkan. Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi ( $\alpha = 0,05$ ), maka hipotesis nol ditolak, yang berarti bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi, maka variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dalam analisis regresi data panel, uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yang digunakan dalam model secara kolektif mampu menjelaskan perubahan pada variabel dependen. Sebagaimana dijelaskan oleh Wooldridge (2010), pengujian simultan memberikan gambaran mengenai kelayakan model regresi dalam menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti

Berdasarkan hasil pengujian pemilihan model, pendekatan yang paling sesuai dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model (FEM), sehingga model tersebut digunakan sebagai model utama dalam analisis pengaruh variabel independen terhadap tingkat kemiskinan.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan paparan analisis penelitian serta penjelasan dari penelitian yang telah dilakukan peneliti diatas, telah diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil estimasi Fixed Effect Model (FEM) pada periode 2015–2024, variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan koefisien positif dan tidak signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi daerah yang tercermin melalui PDRB belum secara langsung mampu menurunkan kemiskinan di dua puluh provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya bersifat inklusif dan manfaatnya belum terdistribusi secara merata kepada kelompok masyarakat miskin. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi agregat tanpa diikuti pemerataan pendapatan serta penciptaan lapangan kerja yang produktif belum mampu berfungsi secara efektif sebagai instrumen pengentasan kemiskinan.
2. Hasil estimasi Fixed Effect Model (FEM) pada periode 2015–2024 menunjukkan bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) memiliki koefisien negatif dan signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan daya beli petani berperan dalam menurunkan tingkat kemiskinan, terutama di wilayah yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap sektor pertanian. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perbaikan kesejahteraan petani yang tercermin melalui peningkatan NTP mampu memberikan kontribusi nyata terhadap penurunan kemiskinan. Namun demikian, efektivitas peran NTP tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural seperti produktivitas pertanian,

akses pasar, serta stabilitas harga komoditas. Oleh karena itu, peningkatan NTP perlu didukung oleh kebijakan peningkatan produktivitas dan penguatan nilai tambah sektor pertanian agar dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan menjadi lebih optimal.

3. Variabel Tenaga Kerja Petani (TKP) pada periode 2015–2024 menunjukkan koefisien positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor pertanian cenderung berkorelasi dengan peningkatan tingkat kemiskinan. Kondisi ini mencerminkan bahwa sektor pertanian masih berperan sebagai sektor penampung tenaga kerja berproduktivitas rendah, di mana peningkatan jumlah tenaga kerja tidak selalu diikuti oleh peningkatan output per tenaga kerja. Dengan demikian, tingginya proporsi tenaga kerja di sektor pertanian lebih mencerminkan keterbatasan kesempatan kerja di sektor non-pertanian dibandingkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga transformasi struktural ekonomi menjadi faktor penting dalam upaya pengentasan kemiskinan.
4. Hasil estimasi Fixed Effect Model (FEM) pada periode 2015–2024 menunjukkan bahwa Harapan Lama Sekolah (HLS) memiliki koefisien negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan akses pendidikan yang tercermin melalui meningkatnya lama sekolah mampu berkontribusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Pendidikan yang lebih tinggi berpotensi meningkatkan kualitas sumber daya manusia, produktivitas tenaga kerja, serta peluang memperoleh pekerjaan dengan tingkat pendapatan yang lebih baik. Oleh karena itu, peningkatan pendidikan memiliki peran penting dalam mendukung pengurangan kemiskinan, khususnya apabila diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan pasar kerja.
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada periode 2015–2024 menunjukkan koefisien positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Temuan ini

menunjukkan bahwa peningkatan tingkat pengangguran berkorelasi dengan peningkatan jumlah penduduk miskin. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keterbatasan kesempatan kerja produktif masih menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dinamika kemiskinan di wilayah penelitian. Dengan demikian, upaya pengurangan pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja produktif serta peningkatan kualitas tenaga kerja menjadi faktor penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan secara berkelanjutan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan analisis pada data dan Kesimpulan yang diambil sebelumnya, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil yang menunjukkan bahwa PDRB belum berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan, pemerintah disarankan untuk mengarahkan kebijakan pembangunan pada peningkatan kualitas dan inklusivitas pertumbuhan ekonomi. Selain mendorong hilirisasi berbasis sumber daya lokal, pemerintah perlu memperkuat sektor padat karya, pengembangan UMKM, serta integrasi ekonomi lokal agar pertumbuhan PDRB mampu menciptakan lapangan kerja produktif dan meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat miskin. Kebijakan pengurangan ketimpangan wilayah melalui pembangunan infrastruktur ekonomi dan insentif investasi di daerah miskin juga menjadi penting agar manfaat pertumbuhan lebih merata. Bagi akademisi, penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukkan variabel ketimpangan pendapatan atau struktur sektoral guna menjelaskan mekanisme transmisi pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah disarankan untuk memperkuat kebijakan peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha tani guna menjaga peningkatan daya beli petani secara berkelanjutan. Selain hilirisasi komoditas pertanian, kebijakan seperti reformasi subsidi input agar lebih tepat sasaran, peningkatan kualitas penyuluhan pertanian, serta penguatan akses petani terhadap pembiayaan dan pasar perlu diprioritaskan. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan petani serta

mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga komoditas. Bagi akademisi, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji kesejahteraan petani secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan perbedaan subsektor pertanian.

3. Temuan bahwa Tenaga Kerja Petani berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor penampung tenaga kerja berproduktivitas rendah. Oleh karena itu, pemerintah disarankan untuk mendorong transformasi struktural melalui modernisasi pertanian, pengembangan agroindustri dan hilirisasi, serta penciptaan lapangan kerja non-pertanian di wilayah pedesaan. Selain itu, kebijakan peningkatan keterampilan tenaga kerja dan dukungan kewirausahaan lokal perlu dikembangkan agar tenaga kerja pertanian memiliki alternatif sumber pendapatan yang lebih produktif. Bagi akademisi, penelitian selanjutnya disarankan untuk menganalisis peralihan tenaga kerja antar sektor dan dampaknya terhadap kemiskinan.
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Harapan Lama Sekolah (HLS) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah disarankan untuk terus meningkatkan akses pendidikan sekaligus memperbaiki kualitas pendidikan agar mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Pemerintah juga perlu memperkuat pendidikan vokasional, pelatihan keterampilan berbasis potensi daerah, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik dan sarana pendidikan. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga pendidikan dapat berkontribusi secara nyata terhadap penurunan kemiskinan. Bagi akademisi, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji pengaruh kualitas pendidikan dan keterampilan terhadap kemiskinan dalam jangka Panjang
5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah disarankan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja produktif melalui pengembangan industri pengolahan, penguatan UMKM, serta kebijakan

ketenagakerjaan yang mampu meningkatkan pendapatan tenaga kerja. Selain itu, program peningkatan keterampilan dan pelatihan kerja perlu diperkuat agar tenaga kerja memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Bagi akademisi, penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukkan indikator kualitas pekerjaan, seperti tingkat upah dan tingkat informalitas, dalam analisis kemiskinan..

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, F., Sinaga, R., Asyari, Soeyatno, R. F., Silitonga, D., Solikin, A., Hubbansyah, A. K., Siregar, R. T., Maulina, D., Kusumaningrum, R., Sahamony, N. F., Litiani, E., & Ladjin, N. (2022). *Ekonomi Pembangunan*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Arsyad, L. (2015). Ekonomi Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi. *Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan*, 05(01), 1–37.
- Baum, C. F., Schaffer, M. E., & Stillman, S. (2003). Instrumental Variables and GMM: Estimation and Testing. *The Stata Journal: Promoting Communications on Statistics and Stata*, 3(1), 1–31.  
<https://doi.org/10.1177/1536867x0300300101>
- BPS. (2022). *Indeks Harga yang Diterima Petani Provinsi DKI Jakarta 2018 - 2022 (2012=100)*. <https://jakarta.bps.go.id/id/statistics-table/1/NjI4IzE=/indeks-harga-yang-diterima-petani-provinsi-dki-jakarta-2018---2022--2012-100-.html>
- BPS. (2023a). *Gini Ratio in March 2023 was 0.388*.  
<https://www.bps.go.id/en/pressrelease/2023/07/17/2035/gini-ratio-in-march-2023-was-0-388-.html>
- BPS. (2023b). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2023*.  
<https://jakarta.bps.go.id/id/pressrelease/2023/12/01/1085/indeks-pembangunan-manusia--ipm--tahun-2023.html>
- BPS. (2023c). *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2023*.  
<https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/08/f8c567805aa8a6977bd4594a/keadaan-angkatan-kerja-di-indonesia-agustus-2023.html>
- BPS. (2023d). *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Februari 2023*.  
<https://www.bps.go.id/id/publication/2023/06/09/5ce5c75f3ffabce2d6423c4a/keadaan-angkatan-kerja-di-indonesia-februari-2023.html>
- BPS. (2023e). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*.

- BPS. (2023f). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*.  
<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>
- BPS. (2024a). Analisis Kemiskinan Makro Indonesia. *Badan Pusat Statistik Statistik*, 68.  
<https://www.bps.go.id/publication/2021/11/30/9c24f43365d1e41c8619dfe4/pe nghitungan-dan-analisis-kemiskinan-makro-indonesia-tahun-2021.html>
- BPS. (2024b). Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha. *Badan Pusat Statistik*, 12, 1–92.
- BPS. (2025a). *Poverty Rate Continues to Decline*.  
<https://www.bps.go.id/en/news/2025/07/25/731/poverty-rate-continues-to-decline.html>
- BPS. (2025b). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2020-2024*.
- Chambers, R. (1983). Rural Development: Putting the last first. In *Rural Development: Putting the last first*. <https://doi.org/10.4324/9781315835815>
- Davala, M. R., Annisa, N. M., Siswanto, S., & Kalondeng, A. (2024). Pemodelan Data Kemiskinan di Pulau Sumatera dengan Regresi Multilevel Spline Linear Truncated. *Indonesian Journal of Applied Statistics*, 7(1), 1.  
<https://doi.org/10.13057/ijas.v7i1.80768>
- Deby Oktaviana, W. P. P. dan M. W. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Kabupaten, Dan Pengangguran, Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Madiun. 3(5), 6.
- Development, H. (2022). *Rapport sur le développement humain 2021/2022*.  
<http://hdr.undp.org>
- Echevin, D., Fotso, G., Bouroubi, Y., Coulombe, H., & Li, Q. (2025). *Jurnal Ekonomi Pembangunan Menggabungkan data survei dan sensus untuk meningkatkan prediksi kemiskinan menggunakan semi-supervised deep learning*. 172(September 2024).
- Echevina, D., Fotsob, G., Bouroubib, Y., Coulombec, H., & Li, Q. (2025). Combining survey and census data for improved poverty prediction using semi-supervised deep learning. *Journal of Development Economics*, 172, 1–17.

- FAN, S. gen, & CHO, E. E. Y. (2021). Paths out of poverty: International experience. *Journal of Integrative Agriculture*, 20(4), 857–867.  
[https://doi.org/10.1016/S2095-3119\(20\)63295-6](https://doi.org/10.1016/S2095-3119(20)63295-6)
- Farida, V. N., & Widodo, W. (2024). Pengaruh Produktivitas Pertanian terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia 2015-2020. *Fokus Bisnis Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 23(1), 17–27.  
<https://doi.org/10.32639/fokbis.v23i1.846>
- FRANÇOIS BOURGUIGNON, S. C. (2003). The measurement of multidimensional poverty. *Journal of Economic Inequality*, 25–49.  
<https://doi.org/10.1023/A>
- Fujiansyah, D., Aprini, N., & Rainbow, G. A. (2022). Kontribusi Hasil Produksi Sektor Pertanian, Kehutanan & Perikanan Dan Ipm Dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan Di Sumatera Selatan. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 129–137.  
<https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i1.1686>
- Handayani, D. N., & Qutub, S. (2025). Penerapan Random Forest Untuk Prediksi Dan Analisis Kemiskinan. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(2), 406–412.
- Hansen, L. P. (1982). *Large Sample Properties of Generalized Method of Moments Estimators*. JSTOR and the JSTOR logo are trademarks of JSTOR.
- Harahap, A. H., Rahmanta, R., & Lindawati, L. (2022). Poverty Analysis and Agricultural Sector Growth in North Sumatra Province, Indonesia. In *Agro Bali : Agricultural Journal* (Vol. 5, Issue 1, pp. 76–83).
- Hardinandar, F. (2019). *Determinan Kemiskinan (Studi Kasus 29 Kota/Kabupaten Di Provinsi Papua) Determinants Of Poverty (Case Study 29 Cities / District In Papua Province)*.
- Heckman, J. J. (1981). *The Incidental Parameters Problem and the Problem of Initial Conditions in Estimating a Discrete Time- Discrete Data Stochastic Process*.
- Jannah, M., & Setiawan, B. (2021). Analisis pengaruh PDRB per kapita, pengeluaran pemerintah, dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 19, 123–135.
- Kharisma, B. (2020). Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian, Pproduksi dan

Kemiskinan Pedesaan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, September, 211. <https://doi.org/10.24843/jekt.2020.v13.i02.p01>

Kuncoro, M. (2003). *Ekonomi pembangunan : teori, masalah, dan kebijakan*. ogyakarta : UPP AMP YKPN.

Lewis, O. (1966). The Culture of Poverty. *Scientific American, a Division of Nature America, Inc.*, 215(4), 19–25.  
<https://doi.org/10.1080/15595692.2020.1733960>

Lewis, W. A. (1954). Economic development with unlimited supplies of labour. *Trimestre Economico*, 91(364), 975–1029.  
<https://doi.org/10.20430/ete.v91i364.2522>

Mahfuza, S. A., Azmi, Z., & Syahputra, G. (2021). Data Mining Untuk Mengestimasi Angka Kemiskinan Di Sumatera Utara Menggunakan Metode Regresi Linier Berganda. *Jurnal CyberTech*, 4(6), 1–12.

MANUEL ARELLANO, S. B. (1991). *Some Test of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and a Application to Employment Equation*.

Martinez, R. G., & Cooray, M. (2025). *Enhancing Poverty Targeting with Spatial Machine Learning : An application to Indonesia*.

MUBYARTO. (1989). *Pengantar ekonomi pertanian Mubyarto*. Jakarta LP3ES 1989.

Myrdal, G. (1957). *Economic Theory and Underdeveloped Regions*.

MYRDAL, G. (1971). Challenge of World Poverty - Myrdal,G. *Journal of Economic Literature*, 9(3), 833–835.

N., D., & Gujarati. (2009). *Basic Econometrics*. The McGraw- Hill Companles.

Nickell, S. (1981). Biases in Dynamic Models with Fixed Effects. *Ecomometrica*, 49(6), 1417–1426.

Organization, I. L. (1976). Employment, Growth and Basic Needs: A One World Problem. In *Journal of Economic Issues* (Vol. 11, Issue 3).  
<https://doi.org/10.1080/00213624.1977.11503479>

Pangiuk, A. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Kemiskinan Di Provinsi Jambi Tahun 2009-2013. *ILTIZAM Journal of Sharia Economic Research*, 2(2), 44.

<https://doi.org/10.30631/iltizam.v2i2.160>

- Prabowo, B. S., & Faridatussalam, S. R. (2022). *Determinan Tingkat Kemiskinan Di Pulau Sumatera Tahun 2016-2021*. 1–13.
- Prastyadia, M. A., Suparta, I. W., & Murwiati, A. (2024). Measuring the Ability of Poverty Alleviation Programs in Reducing Rural Poverty Levels in Eastern Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 22(02), 116–131.
- Priseptian, L., & Primandhana, W. P. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. *Forum Ekonomi*, 24(1), 45–53.  
<https://doi.org/10.30872/jfor.v24i1.10362>
- Putri, D. M., & Friska, D. (2024). Pendekatan Komparatif Algoritma Machine Learning Untuk Prediksi Kemiskinan Global. *Map Journal Mathematics & Applications*, 10, 133–140.
- Ragnar Nurkse. (1953). *Problem Of Capital Formation In Underdeveloped Countries* (P. 171).
- Ratih, A., Gunarto, T., & Murwiati, A. (2023). Is Multidimensional Poverty Different from Monetary Poverty in Lampung Province? *Advances in Economics, Business and Management Research*, 10, 202–208.  
<https://doi.org/10.2991/978-2-38476-064-0>
- Rowntree, B. S. (1901). A study of town life. *Macmillan and Co., London.*, 44(0).  
<https://wellcomecollection.org/works/cv2ekdg7>
- S Wahyuni, S. H. (2020). Analisis nilai tukar petani sebagai indikator kesejahteraan rumah tangga petani di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 4, 245–258.
- Safira Maulidina, Vadilla Mutia Zahara, H. S. (2022). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Pada Sektor Pertanian Di Indonesia Bagian Barat. *National Conference On Applied Business, Education, & Technology (Ncabet)*, 257–269.
- Sajogyo, P. (1989). *Sosiologi Perdesaan*. Gadjah Mada University Press.
- Sen, A. (1999). Develoepment as freedom. *Anchor Books, New York*, 384.
- Sihombing, P. R., & Arsani, A. M. (2021). Comparison Of Machine Learning Methods In Classifying Poverty In Indonesia In 2018 Perbandingan Metode Machine Learning Dalam Klasifikasi Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2018. *Jurnal Teknik Informatika (Jutif)*, 2(1), 51–56.

- Soekartawi. (2007). *E-Agribisnis : Teori Dan Aplikasinya*.
- Sugiharti, L., Purwono, R., Esquivias, M. A., & Jayanti, A. D. (2022). Poverty Dynamics in Indonesia: The Prevalence and Causes of Chronic Poverty. *Journal of Population and Social Studies*, 30, 423–447. <https://doi.org/10.25133/JPSSv302022.025>
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Suharto, E. (2009). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. Bandung : Alfabeta, 2009.
- Sukirno. (2016). *Makroekonomi*.
- Tambunan, T. T. H. (2001). *Perekonomian Indonesia (Teori dan Temuan Empiris)*. Ghalia Indonesia, 2001.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). Economic Development. Thirteenth Edition. In *Pearson* (Issue 13th Edition). <https://www.mkm.ec/en/objectives-activities/economic-development>
- Townsend, P. (1982). Poverty in the United Kingdom: A Survey of Household Resources and Standards of Living. Peter Townsend. *American Journal of Sociology*, 88(2), 452–454. <https://doi.org/10.1086/227691>
- Triatmo, W. (2024). Pengaruh Indikator Pertanian Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah. *Jurnal E-Bis*, 8(2), 507–519. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v8i2.1849>
- Udi, K., Restiatun, & Rosyadi. (2023). *Pengaruh Pertumbuhan Sektor Pertanian, Jumlah Pekerja Sektor Pertanian Dan Nilai Tukar Petani Terhadap Tingkat Kemiskinan Perdesaan Di Indonesia*. 42–53.
- Umara, G., Gunarto, T., & Yuliawan, D. (2024). Influence Human Development Index , Open Unemployment Rate , and Product Gross Regional Domesticity Per Capita on Poverty in Indonesia. *Revenue Journal: Management and Entrepreneurship*, 2(1), 14–18.
- Wang, J., Xiao, H., & Liu, X. (2023). The Impact of Social Capital on Multidimensional Poverty of Rural Households in China. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(1). <https://doi.org/10.3390/ijerph20010217>

- Wooldridge, J. M. (2010). *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*. The MIT Press.
- World Bank. (2022). Correcting Course. In *World Bank*.  
<https://doi.org/10.1007/s12129-017-9620-1>
- World Bank. (2025a). *Multidimensional Poverty Measure*.
- World Bank. (2025b). *The World Bank's Updated Global Poverty Lines: Indonesia*. World Bank Group.  
<https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2025/06/13/updated-global-poverty-lines-indonesia>
- Yang, G., Zhou, C., & Zhang, J. (2023). Does industry convergence between agriculture and related sectors alleviate rural poverty: evidence from China. *Environment, Development and Sustainability*, 25(11), 12887–12914.  
<https://doi.org/10.1007/s10668-022-02594-y>